

Vol 13 No 1 (2025): February

Konsentrasi Kepemilikan, Penentuan Harga Transfer dan Penggeseran Laba pada Perusahaan Nonkeuangan
Ifandry Tampubolon

Evaluasi Waste Management Dengan Lean Thinking pada Siklus Produksi : Studi Kasus pada Mixed Ownership Company
Muhammad Aditya Amri, Heyvon Herdhayinta

Perhitungan Biaya Sekolah terhadap Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Studi Komparasi pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Al-Azhar Di Kabupaten Sleman)
Harry Fadholi Lakadjo, Rusdi Akbar

Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Adhitya Akhmadi

Pengaruh Uang Saku, Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan Terhadap keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa STIE Surakarta)
Febryana Vinky Hernanda, Era Trianita Saputra

Published by Master of Accounting, Faculty of Economics and Business
Universitas Gadjah Mada

Konsentrasi Kepemilikan, Penentuan Harga Transfer dan Penggeseran Laba pada Perusahaan Nonkeuangan

Ifandry Tampubolon^{1*}

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Intisari

Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba serta membuktikan apakah adanya peran konsentrasi kepemilikan saham perusahaan akan mengubah hasil hubungan antara penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba.

Metode Penelitian – Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan seluruh perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2020 serta tax rate table KPMG sebagai sumber pengambilan data penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dan didapatkan sample sebanyak 143 perusahaan.

Temuan – Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penentuan harga transfer berpengaruh signifikan positif terhadap penggeseran laba. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan multinasional yang melakukan penentuan harga transfer cenderung akan melakukan penggeseran laba dari yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke yuridiksi pemajakan dengan tarif yang lebih rendah. Adanya konsentrasi kepemilikan tidak memengaruhi hubungan antara penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan tidak berfokus kepada pemegang saham dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi saja, melainkan berfokus kepada semua stakeholder lainnya.

Orisinalitas – Penelitian ini menambahkan adanya peran konsentrasi kepemilikan perusahaan pada pengaruh penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba. Penelitian ini juga menggunakan alat ukur yang berbeda dari penelitian terdahulu dan sampel yang lebih banyak, serta mempertimbangkan faktor covid-19 sebagai kontrol agar dapat melihat hasil yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Penentuan Harga Transfer, Penggeseran Laba, Konsentrasi Kepemilikan*

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

Pendahuluan

Suatu hal yang sering mendapat perhatian dari pemangku kepentingan dalam laporan keuangan perusahaan yaitu informasi terkait laba perusahaan. Dari laporan laba perusahaan dapat dilihat bagaimana efisiensi pengembalian dana atas investasi, pengukur kinerja perusahaan, dasar pengenaan pajak dan dasar pembagian dividen (Suwardjono, 2011). Berdasarkan hal tersebut informasi terkait laba perusahaan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (kreditur, debitur, investor, dll) untuk memutuskan apakah akan menjalin suatu hubungan kerjasama dengan entitas tersebut atau tidak.

Menurut Ardianto (2019) laba merupakan total pendapatan setelah dikurangkan dengan total bebannya. Pada umumnya investor mendirikan perusahaan untuk memperkaya dirinya

dengan cara menghasilkan laba yang positif dan meningkatkan nilai usahanya (Gitman, Smart, dan Joehnk, 2017). Menurut Pepper dan Gore (2015) dalam melakukan operasinya, prinsipal tidak mampu melakukan semuanya sendiri, sehingga prinsipal merekrut manajemen sebagai agen untuk melaksanakan operasi perusahaannya. Selama operasi perusahaan dijalankan, prinsipal tentu saja menginginkan laba yang maksimal sehingga manajemen (agen) dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar para pemangku kepentingan tertarik untuk terus menjalin hubungan kerjasama terhadap perusahaan tersebut.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan laba yang dapat digunakan oleh manajemen adalah penggeseran laba. Penggeseran laba merupakan salah satu cara yang digunakan manajemen untuk

mengoptimalkan laba. Penggeseran laba adalah transfer laba dari perusahaan di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak relatif tinggi ke perusahaan afiliasi di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak relatif lebih rendah, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Castillo-Murciego dan López-Laborda, 2023). Pramesthi *et al.* (2019) berpendapat bahwa penggeseran laba dapat dilakukan dengan sesama perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional dengan tujuan untuk menurunkan pembayaran pajak. Sehingga, mendorong para manajemen perusahaan untuk mengalihkan laba perusahaannya ke negara-negara *tax haven* dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara di negara asal (Pramesthi *et al.*, 2019). Penggeseran laba juga perlu diperhatikan oleh para manajemen karena melakukan praktik penggeseran laba yang berlebihan dapat

meningkatkan asimetri informasi dan ketidakpastian informasi terkait informasi laba perusahaan (Chen *et al.*, 2018).

Pada negara berkembang, penentuan harga transfer dapat menjadi alat yang potensial untuk penghindaran pajak dengan melakukan mekanisme penggeseran laba. (Castillo-Murciego dan López-Laborda, 2023). Menurut Mowen (2018) penentuan harga transfer adalah harga yang ditentukan pada suatu barang saat dijual ke divisi yang berbeda pada satu perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer juga dapat digunakan untuk memanipulasi harga dengan tujuan untuk mengecilkan laba perusahaan atau membuat perusahaan terlihat rugi untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan laba ke entitas lain di yuridiksi pemajakan yang berbeda dengan tarif pajak yang relatif rendah

dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan istimewa (Baroroh, Malik, dan Jati, 2021). Menurut Amidu, Coffie, dan Acquah (2019) dalam penelitian menyatakan bahwa manipulasi penentuan harga transfer merupakan mekanisme penghindaran yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam tujuannya untuk memaksimalkan laba dan mengecilkan jumlah pembayaran pajak.

Contohnya adalah kasus PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) yang terjadi pada tahun 2019. ADRO terindikasi melakukan praktik penentuan harga transfer untuk menggeser labanya ke perusahaan afiliasinya Coaltrade Service International dari tahun 2009-2017 sehingga membuat ADRO menghemat jumlah pembayaran pajaknya sekitar Rp1,75 triliun dalam periode tersebut (Wareza, 2019).

Kasus serupa terjadi dalam kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada tahun pajak 2007 dan 2008. Salah satu produsen otomotif terbesar di Indonesia ini melakukan penentuan harga transfer dengan cara menjual produknya sebanyak 17.810 unit dibawah harga wajar ke perusahaan anaknya yaitu, Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd di negara Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia. Aktivitas ini menyebabkan TMMIN menghemat pembayarannya senilai Rp1,2 triliun (Febrianti, 2020). Seperti yang dijelaskan di dalam penelitian Lo, Wong dan Firth (2010), bahwa penentuan harga transfer digunakan untuk menggeser laba dari perusahaan intragrup di yuridiksi pemajakan yang menerapkan tarif pajak relatif tinggi ke perusahaan afiliasi di yuridiksi pemajakan yang menerapkan tarif pajak relatif rendah.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan.

Dalam proses pengambilan keputusan di suatu perusahaan tentu saja melibatkan para owner sebagai pemegang saham. Hal ini juga termasuk dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penentuan harga transfer. Medioli et al. (2023) menjelaskan bahwa konsentrasi pemegang saham yang tinggi cenderung kurang memperhatikan kepentingan pemegang saham dengan kepemilikan yang kecil (*minority shareholder*), hal ini membuat entitas induk semakin leluasa melakukan strategi penghindaran pajak seperti penentuan harga transfer guna memaksimalkan laba.

Tinjauan Pustaka

Teori Pemangku Kepentingan

Freeman menyatakan bahwa manajemen perusahaan perlu merancang dan

menerapkan kebijakan yang memperhatikan semua pihak terkait yang dapat terdampak dalam operasional perusahaan. Hal utama dalam proses ini yaitu pengelolaan dan pengintegrasian hubungan dan kepentingan pemilik perusahaan, pegawai, rekanan, masyarakat dan kelompok lain agar dapat lebih memastikan keberlanjutan perusahaan (Freeman dan McVea, 2001). Menurut Chew dan Gillan (2005) pemangku kepentingan bukan hanya pemegang saham tetapi pegawai, pelanggan, pemasok, dan komunitas yang lebih luas lagi. Model pemangku kepentingan menekan operasi dan aktivitas perusahaan lebih mementingkan seluruh pemangku kepentingan yang bisa terdampak daripada mengutamakan keuntungan pemegang saham. Teori pemangku kepentingan menyatakan keberlangsungan operasional

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

perusahaan perlu mempertimbangkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak tersebut selain pemegang saham adalah pihak lain seperti kreditur, pemerintah, pegawai dan pihak terkait lainnya.

Penentuan Harga Transfer

Mowen et al. (2017) mendefinisikan penentuan harga transfer adalah harga yang di diterapkan atau yang digunakan pada pertukaran barang dan/atau jasa saat dijual ke divisi yang berbeda dalam satu perusahaan atau satu grup perusahaan yang sama. Tampubolon dan Farizi (2018) menyatakan hal yang serupa, yaitu penentuan harga transfer merupakan pertukaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh dua entitas dalam suatu grup perusahaan multinasional. Dua perusahaan disebut berasosiasi jika salah satu entitas turut terlibat dan aktif dalam aktifitas perusahaan yang berperan sebagai manajemen dan memiliki posisi untuk mengendalikan perusahaan atau modal entitas lain (OECD, 2022).

Penggeseran Laba

.Menurut Kagan (2020) penggeseran laba adalah strategi perencanaan pajak

dengan mentransfer laba dari yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak yang relatif tinggi ke yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak yang relatif rendah, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Medioli et al., 2023) menyimpulkan hal yang sama bahwa perusahaan anak melakukan penggeseran laba ke perusahaan dengan tujuan penghindaran pajak.

Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini ialah jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh individu atau entitas pada suatu perusahaan. Lean (2015) memberikan definisi konsentrasi kepemilikan sebagai jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu maupun jenis kumpulan pemegang saham. Menurut Al Lawati dan Sanad (2023) konsentrasi kepemilikan, sebagaimana ditentukan oleh proporsi saham yang

dimiliki oleh satu individu atau entitas, dapat berdampak pada struktur tata kelola perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting, terutama di negara berkembang dimana peraturan dan penegakan hukum masih belum ditegakkan sepenuhnya (Alhababsah, 2019).

Pengaruh Penentuan Harga Transfer terhadap Penggeseran Laba

Berlandaskan dengan teori keagenan, Kaiser (2006) berpendapat bahwa penentuan harga transfer tidak efektif karena manajemen anak perusahaan tidak bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal saat penentuan harga transfer lebih tinggi dari harga pasar, sehingga konflik kepentingan terjadi antara manajemen perusahaan induk dan manajemen perusahaan anak. Manajemen perusahaan anak ingin

menyajikan laporan keuangan dengan laba yang tinggi, sama halnya dengan manajemen perusahaan induk menginginkan hal yang serupa. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan induk dapat mengalihkan labanya ke entitas asosiasi di yuridiksi pemajakan yang berbeda dengan tarif pajak relatif lebih rendah dengan melakukan praktik penentuan harga transfer. Namun Mahtani (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penentuan harga transfer dengan melihat volume dari *Related Parties Transaction* (RPT) akan meningkatkan laba perusahaan, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Lebih lanjut Sari dkk. (2021) menyimpulkan laba yang meningkat adalah hasil dari penggunaan strategi penentuan harga transfer untuk menggeser laba dari perusahaan di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan afiliasi

di yuridiksi pemajakan yang berbeda dengan tarif pajak yang lebih rendah.

H1: Penentuan harga transfer berpengaruh positif terhadap penggeseran laba

Konsentrasi Kepemilikan Memperkuat Pengaruh Penentuan Harga Transfer Terhadap Penggeseran Laba

Hak pemegang saham minoritas cenderung kurang diperhatikan akibat adanya adanya konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan pemilik saham mayoritas memiliki kendali yang kuat dalam menentukan strategi dan kebijakan perusahaan (Filatotchev et al., 2001). Dalam pengambilan keputusan perusahaan, tentu saja para pemegang saham turut andil dalam prosesnya. Keikutsertaan pemegang saham dalam proses ini salah satunya adalah untuk

meningkatkan nilai investasinya. Seluruh aktifitas perusahaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan laba perusahaan merupakan hal yang menarik bagi pemegang saham.

Pemegang saham memiliki hak untuk menentukan keputusan pada suatu perusahaan. Keputusan ini ditentukan oleh suara terbanyak, sehingga pemegang saham terbesar lah yang memiliki kendali lebih besar (Al Lawati dan Sanad, 2023). Termasuk saat perusahaan ingin memutuskan untuk melakukan penentuan harga transfer. Seperti yang terjadi pada kasus PT Adaro Energy dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan konsentrasi saham yang cukup tinggi, dapat diasumsikan keputusan tersebut dilakukan karena kontrol segelintir pemegang saham terbesar saja. Secara umum, peningkatan laba perusahaan memberi peluang pemegang saham

untuk mendapat pengembalian investasi yang lebih baik, artinya pemegang saham dengan tingkat kepemilikan yang relatif tinggi, akan mendapat porsi pengembalian investasi yang lebih tinggi. Konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada perusahaan multinasional dapat memberikan suatu peluang untuk merencanakan transaksi intra grup perusahaan. Transaksi intra grup termasuk dalam transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa memiliki potensi untuk meningkatkan laba perusahaan secara grup. Potensi ini, dapat mendorong pemegang saham agar menetapkan kebijakan untuk memperbesar jumlah transaksi hubungan istimewa. Keuntungan maksimal dari transaksi hubungan istimewa ialah dengan cara meminimalkan jumlah kewajiban pajak tahunan perusahaan secara grup. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan laba

perusahaan yang berada di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak relatif tinggi ke perusahaan afiliasi yang berada di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak relatif rendah.

Berdasarkan dari penjabaran di atas hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₂: Konsentrasi kepemilikan memperkuat hubungan antara penentuan harga transfer dengan penggeseran laba.

Metode Penelitian

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan model *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Creswell (2012) menjelaskan *explanatory research* adalah suatu desain penelitian korelasional dimana peneliti menganalisis hubungan antara variabel (dua atau lebih), dan perubahan dalam satu variabel terhadap dalam perubahan variabel yang lain. Dalam penelitian ini variabel independen penentuan harga

transfer terhadap variabel dependen penggeseran laba dengan variabel moderasi konsentrasi kepemilikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data hasil olahan dari

laporan posisi keuangan dan catatan kaki laporan keuangan pada perusahaan yang telah terdaftar di BEI dalam periode 2018-2020.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Indikator	Sumber Data
Independen	Penentuan Harga Transfer	$TP = \frac{\text{Total Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Asset}}$ Sari et al. (2021)	Laporan Tahunan
	Konsentrasi Kepemilikan	$OC = \text{Persentase Kepemilikan Saham Terbesar}$ Medioli et al. (2023)	Laporan Tahunan
Dependen	Penggeseran Laba	$\text{Profit Shifted} = \sum_{i=1}^n \frac{pbt_t}{1-\tau_i} * \text{taxdif} * (\tau_i - \tau_j)$ Nerudová & Pavel (2021)	Laporan Tahunan
Kontrol	Ukuran Perusahaan	$Size = \ln(\text{Total Sales})$ Sritharan & Vinasithamby (2015)	Laporan Tahunan
	Pertumbuhan Perusahaan	$Growth = \frac{\text{Total Sales}_t - \text{Total Sales}_{t-1}}{\text{Total Sales}_{t-1}}$ Pangesti et al. (2023)	Laporan Tahunan
	Leverage	$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$ Pangesti et al. (2023)	Laporan Tahunan
	Kinerja Perusahaan	$ROA = \frac{\text{Profit before tax}}{\text{Total Asset}}$ Amidu et al. (2019)	Laporan Tahunan
	Covid-19	Perusahaan sampel dalam penelitian pada periode sebelum dan saat Covid-19 Atayah et al. (2022)	Periode Covid-19

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan

keuangan, catatan laporan keuangan, *tax rate table* dan laporan tahunan dari perusahaan nonkeuangan yang telah

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

terdaftar di BEI dalam tiga tahun dari 2018 hingga 2020. Sumber data diperoleh dari website perusahaan penyedia data laporan keuangan, yaitu *www.kartbes.com*. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang listing di BEI dari 2018 hingga 2020. *Purposive sampling* digunakan pada penelitian ini, yaitu pemilihan sampel secara acak dengan kriteria yang telah ditentukan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI dari 2018 hingga 2020. Populasi pada penelitian ini sebanyak 1.839 perusahaan. Pemilihan sampel secara acak berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan (*purposive sampling*) oleh peneliti sehingga didapatkan sebanyak 143 sampel perusahaan.

No	Keterangan	Total
1	Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI Pada tahun 2018-2020	1.839
2	Perusahaan nonkeuangan yang tidak mengungkapkan item-item lengkap terkait dengan data yang dibutuhkan pada tahun 2018-2020	(1677)
3	Outlier	(19)
Jumlah Sampel Data		143

Sumber: Data penelitian yang diolah

Model Analisis

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis regresi ini dengan model sebagai berikut:

$$\text{Model 1: } IS_{i,t} = \alpha + \beta_1 TP_{i,t} + \beta_2 GROWTH_{i,t} + \beta_3 SIZE_{i,t} + \beta_4 DAR_{i,t} + \beta_5 ROA_{i,t} + \beta_6 COVID_{i,t} \varepsilon$$

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

$$\text{Model 2: } IS_{i,t} = \alpha + \beta_1 TP_{i,t} + \beta_2 OC_{i,t} + \beta_3 (TP_{i,t} * OC_{i,t}) + \beta_4 GROWTH_{i,t} + \beta_5 SIZE_{i,t} + \beta_6 DAR_{i,t} \\ + \beta_7 ROA_{i,t} + \beta_8 COVID_{i,t} \varepsilon$$

Penjabaran,

α : Konstanta
 β : Koefisien regresi
 $IS_{i,t}$: Penggeseran laba pada perusahaan i selama tahun t
 $TP_{i,t}$: Harga transfer pada perusahaan i selama tahun t
 $OC_{i,t}$: Konsentrasi kepemilikan pada perusahaan i selama tahun t
 $GROWTH_{i,t}$: Tingkat pertumbuhan pada perusahaan i selama tahun t
 $SIZE_{i,t}$: Ukuran pada perusahaan i selama tahun t
 $DAR_{i,t}$: *Leverage* pada perusahaan i selama tahun t
 $ROA_{i,t}$: Performa pada perusahaan i selama tahun t
 $COVID_{i,t}$: Periode Covid-19 pada perusahaan i selama tahun t
 t : Tahun yang diteliti
 i : Perusahaan yang diteliti
 ε : *Error*

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menguji dua regresi, yaitu model 1 regresi linier berganda dan model 2 regresi moderasi. Model 1 menguji adanya analisis pengaruh variabel independen, yaitu penentuan harga transfer dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, pertumbuhan, *leverage*, covid-19 dan kinerja perusahaan terhadap penggeseran laba. Model 2 pada penelitian ini merupakan hasil uji regresi moderasi dengan menambahkan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel moderasi. Untuk melihat hasil dari pengujian regresi dapat melihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi

Variabel	Income Shifting	
	Model 1	Model 2
TP	0.019**(2.197)	0.017 (0.718)
OC		0.005 (0.621)
TPxOC		0.002 (0.060)
FS	0.000 (0.440)	0.000 (0.541)
GROWTH	0.005 (1.246)	0.005 (1.219)
DAR	-0.009 (-1.481)	-0.009 (-1.511)
ROA	-0.006 (-0.461)	-0.008 (-0.588)
COVID	0.008*** (3.014)	0.008*** (3.045)
Konstanta	0.007	0.002
R ²	0.126	0.131
Adj. R ²	0.087	0.079
Std. Error	0.014	0.014
F value	3.259	2.520
Sig.	0.005	0.014
N	143	143

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024.

***signifikan pada tingkat 1%

** signifikan pada tingkat 5%

* signifikan pada tingkat 10%

Pada persamaan model 1 hasil uji nilai F-statistik sebesar 3.259 dengan tingkat signifikan 0.005. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari adj R² pada Tabel 4.5, yaitu 0.087 yang artinya harga transfer bisa menjelaskan penggeseran laba sebesar 8,7%.

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta sebesar 0,007. Nilai koefisien regresi harga transfer (TP) sebesar 0,019 berarti bahwa jika harga transfer meningkat sebanyak 1 satuan, IS mengalami kenaikan sebesar 0,019. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa jika ukuran

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka IS tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

Nilai koefisien regresi pertumbuhan perusahaan (GROWTH) sebesar 0,005 berarti bahwa jika pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, IS mengalami kenaikan sebesar 0,005. Nilai koefisien regresi *leverage* perusahaan (DAR) sebesar -0,009 berarti bahwa jika *leverage* perusahaan meningkat sebanyak 1 satuan, IS mengalami penurunan sebesar 0,009. Nilai koefisien regresi kinerja perusahaan (ROA) sebesar -0,006 menunjukkan bahwa jika kinerja perusahaan meningkat sebanyak 1 satuan, maka IS akan mengalami penurunan sebesar 0,006. Nilai koefisien regresi Covid-19 (COVID) sebesar 0,008 menunjukkan bahwa Covid-19 meningkat sebanyak 1 satuan, sehingga

nilai ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,008.

Pada persamaan model 2 uji F-statistik sebesar 2.520 dengan tingkat signifikan 0.014. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari $adj R^2$ pada Tabel 2, yaitu 0.079 yang artinya harga transfer bisa menjelaskan penggeseran laba sebesar 7,9%.

Tabel pada model 2 di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,002. Nilai koefisien regresi harga transfer (TP) sebesar 0,017 menunjukkan bahwa jika harga transfer meningkat sebanyak 1 satuan, IS mengalami kenaikan sebesar 0,017. Nilai koefisien regresi konsentrasi kepemilikan (OC) sebesar 0.005, menunjukkan bahwa jika konsentrasi kepemilikan meningkat sebanyak 1 satuan, IS akan meningkat sebesar 0.005. Nilai koefisien konsentrasi kepemilikan sebagai peran variabel harga transfer terhadap

penggeseran laba menunjukkan nilai 0.002 menunjukkan bahwa setiap meningkatnya hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan harga transfer sebanyak satuan, maka IS akan mengalami kenaikan sebesar 0.002.

Nilai koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan, tidak akan ada perubahan pada IS, baik kenaikan maupun penurunan. Nilai koefisien regresi untuk pertumbuhan perusahaan (GROWTH) sebesar 0,005 menunjukkan bahwa peningkatan 1 satuan dalam pertumbuhan perusahaan akan menyebabkan IS meningkat sebesar 0,005. Nilai koefisien regresi untuk *leverage* perusahaan (DAR) sebesar -0,009 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada *leverage* perusahaan akan mengakibatkan penurunan IS sebesar

0,009. Nilai koefisien regresi kinerja perusahaan (ROA) sebesar -0,008 menunjukkan bahwa jika kinerja perusahaan meningkat sebanyak 1 satuan, IS mengalami penurunan sebesar 0.008. Nilai koefisien regresi Covid-19 (COVID) sebesar 0,008 menunjukkan bahwa Covid-19 meningkat sebanyak 1 satuan, sehingga nilai ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,008.

Pengaruh Penentuan Harga Transfer terhadap Penggeseran Laba

Dari hasil pengujian hipotesis model 1 (H1) dapat diketahui bahwa penentuan harga transfer berpengaruh positif terhadap penggeseran laba. Hipotesis H1 berada dalam area penerimaan dengan nilai β sebesar 0.004 dan tingkat signifikan 0.043. H1 menunjukan bahwa penerimaan hipotesis pada tingkat keyakinan yang mendukung, yaitu pada tingkat 5%. Berarti setiap peningkatan 1 satuan penentuan harga transfer akan

meningkatkan jumlah penggeseran laba sebesar 0.004.

Sejalan dengan Sari *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyatakan pengaruh positif antara hubungan penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba.

Perusahaan multinasional yang mendirikan perusahaan anak di Indonesia terbukti melakukan penentuan harga transfer untuk menggeser labanya ke perusahaan induk. Terdapat beberapa motivasi perusahaan-perusahaan melakukan praktik penentuan harga transfer, salah satunya adalah memanfaatkan selisih tarif pajak perusahaan (Agana *et al.*, 2018).

Perusahaan induk di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak perusahaan yang relatif lebih tinggi dapat mengalihkan labanya ke perusahaan anak di Indonesia atau sebaliknya. Perusahaan anak di Indonesia dapat mengalihkan labanya ke

perusahaan induk di yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak perusahaan yang relatif lebih rendah dari Indonesia.

Seperti yang dinyatakan di dalam teori keagenan, terdapat tarik menarik antara manajemen dan pemegang saham untuk membuat keputusan-keputusan penting, khususnya yang berkaitan dengan laba. Peran pemegang saham dalam memengaruhi manajemen untuk melakukan penentuan harga transfer adalah tepat, jika tujuannya adalah memaksimalkan laba. Namun, peningkatan laba dari penentuan harga transfer dapat membuat distorsi pendapatan keuangan suatu negara. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, negara adalah salah satu pemangku kepentingan yang berdampak langsung atas keputusan penentuan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, baik manajer maupun pemegang saham

dalam membuat keputusan penentuan harga transfer perlu mempertimbangkan dampak distorsi tersebut.

Konsentrasi Kepemilikan akan Memperkuat Pengaruh Penentuan Harga Transfer Terhadap Penggeseran Laba

Hipotesis model 2 (H2) penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan memperkuat hubungan antara transfer pricing terhadap penggeseran laba. Dari hasil tabel 4.5 ditunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak terbukti memperkuat hubungan antara penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba. Hipotesis H2 berada dalam area penolakan dengan nilai β sebesar -0.008 dan tingkat signifikan 0.334 lebih dari tingkat signifikan 10%.

Dari hasil analisis penelitian dapat diketahui bahwa adanya penambahan variabel konsentrasi kepemilikan sebagai moderasi tidak memengaruhi

hubungan antara penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba. Konsentrasi kepemilikan tidak terbukti untuk meningkatkan praktik penentuan harga transfer dalam suatu perusahaan. Peningkatan laba dalam satu grup perusahaan tidak terbukti dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi kepemilikan. Artinya, tingkat konsentrasi kepemilikan yang relatif tinggi tidak dimanfaatkan oleh pemegang saham untuk meningkatkan transaksi hubungan istimewa, walaupun terdapat kesempatan untuk melakukannya.

Hasil model 2 secara implisit menyatakan bahwa kenaikan laba secara grup yang disebabkan oleh penentuan harga transfer bukan disebabkan oleh tingkat konsentrasi kepemilikan. Sesuai dengan teori pemangku kepentingan, bahwa perusahaan tidak hanya memerhatikan kepentingan pemegang saham saja, walaupun tingkat

konsentrasi kepemilikan saham pada perusahaan tersebut cukup besar. Namun, manajemen perusahaan juga memerhatikan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba serta membuktikan apakah pengaruh konsentrasi kepemilikan memperkuat hubungan antara penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba. Hasil penelitian membuktikan bahwa penentuan harga transfer berpengaruh positif terhadap penggeseran laba. Perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan anak di Indonesia dapat meningkatkan laba secara grup dengan meningkatkan volume transaksi penentuan harga transfer. Pemegang saham perlu meningkatkan pengaruhnya

untuk memotivasi manajemen agar mencari peluang untuk meningkatkan jumlah transaksi penentuan harga transfer. Meskipun penggeseran laba melalui praktik penentuan harga transfer dapat meningkatkan laba perusahaan secara grup, praktik tersebut juga dapat merugikan pendapatan pajak suatu negara, khususnya pada yuridiksi pemajakan dengan tarif pajak relatif tinggi. Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan dampak yang diterima oleh pemangku kepentingan lainnya dari keputusan atas penerapan penggeseran laba dengan metode penentuan harga transfer. Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan.

Konsentrasi kepemilikan sebagai variabel moderasi tidak terbukti memperkuat hubungan antara penentuan harga transfer terhadap penggeseran laba. Hal ini berarti bahwa konsentrasi kepemilikan pada suatu entitas tidak

memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penggeseran laba dengan praktik penentuan harga transfer. Hal ini bisa saja terjadi karena pemerintah Indonesia telah mengadakan aturan yang memadai untuk penanganan transaksi hubungan istimewa diantaranya kewajiban penyampaian dokumen lokal dan kewajiban penyampaian dokumen induk atas transaksi afiliasi. Selain itu, teori pemangku kepentingan memandang bahwa perusahaan telah mempertimbangkan dampak dari transaksi hubungan istimewa terhadap pihak lain seperti pemerintah Indonesia, sehingga tidak hanya fokus pada kepentingan pemegang saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi saja. Dengan adanya kewajiban pengungkapan transaksi hubungan istimewa serta prinsip dasar yang menjadi nilai-nilai teori pemangku

kepentingan, terdapat kemungkinan pemegang saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi tidak melakukan peningkatan kepemilikannya untuk semata mata bertujuan meningkatkan transaksi hubungan istimewa. Namun demikian kedua alasan tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan penelitian yang sejenis dengan menggunakan data perusahaan publik dan perusahaan non publik. Ketersediaan data penentuan harga transfer non publik hanya dimiliki oleh otoritas perpajakan seperti contoh di Indonesia adalah direktorat jenderal pajak. Sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan direktorat jenderal pajak.

Daftar Pustaka

Agana, J. A., Mohammed, A.-K., & Zamore, S. (2018). International transfer pricing and income shifting in developing countries:

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

- Evidence from Ghana. *International Journal of Emerging Markets*, 13(5), 1132–1153.
<https://doi.org/10.1108/IJoEM-05-2017-0181>
- Al Lawati, H., & Sanad, Z. (2023). Ownership Concentration and Audit Actions. *Administrative Sciences*, 13(9), 206.
<https://doi.org/10.3390/admsci13090206>
- Alhababsah, S. (2019). Ownership structure and audit quality: An empirical analysis considering ownership types in Jordan. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 35, 71–84.
<https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.05.006>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259.
<https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Ardhianto, W. N. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi* (1st ed.). Quadrant.
- Atayah, O. F., Dhiaf, M. M., Najaf, K., & Frederico, G. F. (2022). Impact of COVID-19 on financial performance of logistics firms: Evidence from G-20 countries. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*, 15(2), 172–196.
<https://doi.org/10.1108/JGOSS-03-2021-0028>
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The role of profitability in moderating the factors affecting transfer pricing. *Accounting*, 1203–1210.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Castillo-Murciego, Á., & López-Laborda, J. (2023). Tax haven investments for Profit-Shifting: Evidence from Spanish multinationals. *Applied Economics*, 55(53), 6250–6263.
<https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2141464>
- Chen, C.-W., Hepfer, B. F., Quinn, P. J., & Wilson, R. J. (2018). The Effect of Tax-Motivated Income Shifting on Information Asymmetry. *Review of Accounting Studies*, 23(1), 1–47.
<https://doi.org/10.1007/s11142-018-9439-1>
- Chew, D. H., & Gillan, S. L. (2005). *Corporate Governance at the Crossroads: A Book of Readings*. McGrawHill Education, Higher Education.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed). Pearson.
- Febrianti, A. (2020). *Analisis Kasus Transfer Pricing pada Toyota Motor*.
<https://www.scribd.com/document/443434640/Paper-Transfer-Pricing-Toyota>
- Filatotchev, I., Kapelyushnikov, R., Dyomina, N., & Aukutsionek, S. (2001). The Effect of Ownership Concentration on Investment and Performance in Privatized Firms in Russia. *Managerial and Decision Economics*, 22, 299–313.
<https://doi.org/10.1002/mde.1008>

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Gitman, L. J., Smart, S. B., & Joehnk, M. D. (2017). *Fundamentals of investing* (Thirteenth Edition). Pearson Education.
- Kagan, J. (2020, September 12). *Income Shifting: What it is, How it Works*.
<https://www.investopedia.com/terms/i/incomeshifting.asp>
- Kaiser, L. (2006). Agency Relationship and Transfer Pricing Inefficiency. *Acta Oeconomica Pragensia*, 14(3), Article 3.
<https://doi.org/10.18267/j.aop.94>
- Lean, H. H. (2015). *Ownership Concentration, Family Ownership and Leverage: Evidence from Malaysia*. 52(2).
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26.
<https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Mahtani, U. S. (2019). Related Party Transactions in India and Their Impact on Reported Earnings. *The Journal of Developing Areas*, 53(1), 165–178.
<https://doi.org/10.1353/jda.2019.0010>
- Medioli, A., Azzali, S., & Mazza, T. (2023). High ownership concentration and income shifting in multinational groups. *Management Research Review*, 46(1), 82–99.
<https://doi.org/10.1108/MRR-02-2021-0141>
- Mowen, M. M. (2018). *Managerial accounting: The cornerstone of business decision making* (Seventh edition). Cengage Learning.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L. (2017). *Managerial Accounting: The Cornerstone of Business Decision Making*. Cengage Learning.
- Nerudová, D., & Pavel, J. (Eds.). (2021). *Profit Shifting and Tax Base Erosion: Case Studies of Post-Communist Countries*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-74962-0>
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. OECD Publishing.
- Pangesti, M. D., Sugiarti, S., & Siddiq, F. R. (2023). The effect of leverage, profitability, and profit growth on earnings quality. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 5(2), 247–257.
<https://doi.org/10.36067/jbis.v5i2.210>
- Pepper, A., & Gore, J. (2015). Behavioral Agency Theory: New Foundations for Theorizing About Executive Compensation. *Journal of Management*, 41(4), 1045–1068.
<https://doi.org/10.1177/0149206312461054>

*Corresponding Author's email: ifandry.t@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

- Pramesthi, Rr. D. F., Suprapti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting dan pemanfaatan negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2021). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492–516. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>
- Sritharan, & Vinasithamby. (2015). Does firm size influence on firm's Profitability? Evidence from listed firms of Sri Lankan Hotels and Travels sector. *IISTE Research Journal of Finance and Accounting*, 6(6), 201–207.
- Suwardjono. (2011). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. BPFE-Yogyakarta.
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Deepublish.
- Wareza, M. (2019, July 4). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>

Evaluasi Waste Management Dengan Lean Thinking Pada Siklus Produksi : Studi Kasus pada Mixed Ownership Company

Muhammad Aditya Amri^{*1} Heyvon Herdhayinta²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Intisari

Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi *waste management* dengan *lean thinking* bertujuan untuk melihat dan memperbaiki berbagai peluang terjadinya pemborosan dan sarana perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi produksi di PT. XYZ

Metode Penelitian – penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan bentuk data triangulasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan tujuan memperoleh kekayaan data untuk pengambilan keputusan

Temuan – terdapat pemborosan yang ditemukan pada produksi gula di PT. XYZ ini, hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan management, kesalahan operasioanal maupun faktor alam yang tidak dapat dihindari. PT. XYZ merupakan agroindustri yang dimiliki secara mixed ownership, sebagai agroindustri sangat bergantung pada kualitas hasil perkebun yang sensitif terhadap perubahan alam, pasokan tebu diperoleh melalui kebun PT. XYZ atau membeli bahan mentah dari petani. selanjutnya pada proses pengolahannya diperlukan parameter produksi untuk mendapatkan hasil gula yang maksimal. Namun karena tidak bisa dicapainya proses produksi yang optimal karena terjadinya kerusakan alat, kondisi operasi yang tidak bisa terpenuhi, ketidak akuratannya penimbangan maupun kelalaian operator menyebabkan terjadinya pemborosan. Pemborosan yang telah teridentifikasi dilakukan penanganan paling efektif sebagai tindak pencegahan agar tidak terjadi pemborosan biaya secara berkelanjutan.

Orisinalitas - Objek penelitian kali ini berada di Indonesia yang memiliki status mixed ownership yang merupakan perkembangan dari status kepemilikan state owned enterprise, sehingga diharapkan dapat menjalankan proses evaluasi, identifikasi pada waste management dari aktivitas siklus produksi yang telah berjalan selama ini. Penelitian ini menggunakan kerangka yang disusun oleh Klein (2020) untuk dapat mengevaluasi waste management pada siklus produksi.

Kata kunci : Mixed Ownership, Siklus Produksi, Waste Management, Lean Thinking

1. Pendahuluan

Skala produksi perusahaan berstatus *Mixed Ownership* dapat dikategorikan sangat besar karena permintaan hasil produksi tidak hanya ditujukan kepada daerah yang menjadi wilayah operasi perusahaan tersebut, namun dapat menyebar hingga ke luar daerah dimana perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah wilayah setempat. Meski demikian, proses produksi perusahaan *Mixed Ownership* tersebut tidak terhindar dari pemborosan berkelanjutan dalam siklus produksinya. Dalam tujuan dasar

penerapan *Lean Management* (LM), Gasperzs (2007) berpendapat bahwa manajemen wajib mengembangkan sistem produksi berkelanjutan yang mampu menekan pemborosan hingga dapat dihilangkan dan mampu memperbaharui sistem dan pengembangan lanjutan agar siklus operasi produksi perusahaan akan dapat memenuhi fokus utama, yaitu menambah nilai dan mencegah pemborosan. Sejalan dengan itu, Krafcik (1988) mengatakan bahwa perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur harus dapat melaksanakan produksi dengan kualitas dan produktivitas yang maksimal namun menggunakan sumber daya minimal ketika menggunakan konsep *Lean* (L).

Perkembangan *Lean* (L) baik secara teknis maupun praktik telah memberikan dampak signifikan baik dalam mengurangi pemborosan maupun penghapusan pemborosan dan seluruh rantai pasokan di seluruh lini operasi sebuah organisasi, serta dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan, khususnya perusahaan yang bergerak dalam sektor industri manufaktur, perlu untuk memberikan dampak keuntungan langsung bagi seluruh pihak terkait dengan organisasi Shah dan Ward (2007) dan Womack dan Jones (1990).

Hussain dan Malik (2016) menyatakan bahwa organisasi yang sukses dalam penerapan *Lean*, wajib memilih, menilai, dan mengutamakan *Waste* (W) yang paling cepat untuk diperbaiki, atau mendahulukan yang terdeteksi paling awal untuk diperbaiki demi keunggulan produksi. Dalam pengembangan *Waste* (W) lebih lanjut, terdapat klasifikasi ‘tujuh pemborosan mematikan’ oleh Shingo (1989) yang menjelaskan bahwa pemborosan dibagi menjadi tujuh jenis pemborosan klasik, yaitu: *Overproduction; Waiting; Transport; Over-Processing; Inventory; Motion; Defects*. Dalam perkembangannya Liker dan Wu (2006) berpendapat terdapat satu hal lagi dengan menambah *Non-Utilized Talent* dimana karakter pemborosan ini menjelaskan dengan

menempatkan orang yang tidak sesuai kompetensinya dalam suatu kegiatan produksi dapat mengurangi keefektifan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ yang berbentuk *Mixed Ownership* provinsi DIY yang bergerak dalam bidang industri manufaktur bahan pangan utama, penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan bentuk data triangulasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan tujuan memperoleh kekayaan data untuk pengambilan keputusan.

2. Landasan Teori dan Tinjauan

Pustaka

a. Teori Stakeholder

Dalam perkembangan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) pertama kali diperkenalkan ke dalam teori manajemen sebagai jawaban untuk ketidakpuasan dengan kriteria keefektifan keuangan unilateral. Freeman (1984) berpendapat bahwa teori ini mengilustrasikan kepada pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab. Sejak itu, banyak publikasi ilmiah diterbitkan yang bertujuan untuk berkontribusi membuat teori pengetahuan ini menjadi teori yang terbaharukan.

Dalam peran PT. XYZ sebagai salah

satu produsen gula yang akan dipasarkan, terdapat pengaruh para pemangku kepentingan didalamnya, para pemangku kepentingan tersebut adalah para kreditor, investor, masyarakat, supplier, pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya, dimana para pemangku kepentingan tersebut belum dapat mengetahui dengan pasti apakah proses produksi yang dilaksanakan PT. XYZ telah terjadi secara efektif, dan apakah terjadi pemborosan selama produksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah kelompok maupun individu yang memiliki andil untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi agar tercapainya tujuan suatu entitas. PT. XYZ harus menjaga hubungan dengan stakeholder atau para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan mereka, terutama stakeholder yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik (Hörisch et al, 2020).

b. Lean Management

Menurut Krafcik (1988), *Lean Management* (LM), merupakan pendekatan yang dijalankan perusahaan untuk meminimalisir pemborosan, meningkatkan nilai barang yang akan dipasarkan, serta

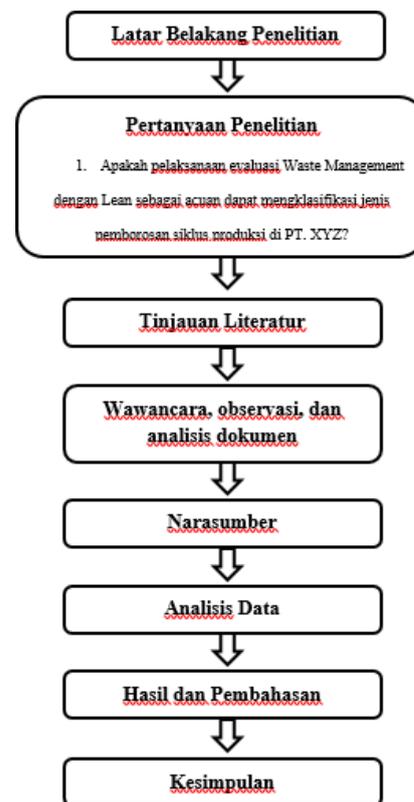
meningkatkan kualitas produksi. Metode *Lean Management* merupakan konsep yang ditemukan di Jepang pada abad 19 Masehi. Dengan sumber daya alam yang terbatas, Jepang mampu memimpin dunia industri dari tahun 1960 hingga saat ini (Melovic *et al*, 2016).

Lean Management (LM) berakar dari *Lean Production System* (LPS) yang dikembangkan oleh *Toyota Production System* (TPS) dalam sebuah pikiran insinyur penciptanya Taiichi Ohno dalam periode setelah perang dunia kedua (Womack, 1990).

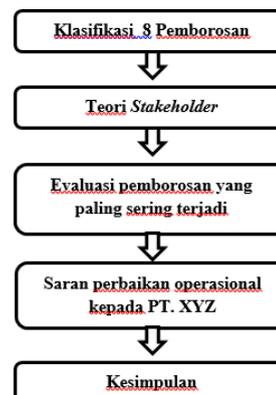
c. Waste Management dengan Lean Thinking

Shah dan Ward (2007) berpendapat bahwa *Lean* telah berfungsi untuk menghasilkan nilai untuk produk atau pelayanan akhir untuk kebutuhan pelanggan, sesuai dengan konsepsi, elemen, dan aktivitas yang dilaksanakan. Sedangkan pemborosan sebagai bentuk lain dari nilai. Seperti yang dijelaskan oleh LeMahieu (2017) yang berpendapat bahwa pemborosan tidak menambah nilai dimata pelanggan, sebagai akibat dari sudut pandang pelanggan yang telah dibayar. *Lean Waste* adalah sistem yang mengintegrasikan elemen sosio-teknika yang bertujuan untuk menghilangkan

pemborosan. Pemborosan, pada dasarnya adalah aktivitas yang menggunakan sumber daya secara berkala namun tidak menciptakan nilai (Womack dan Jones, 2003)



Gambar 2. 1 Alur Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Pada perkembangan penelitian terdahulu, Kazancoglu dan Ozkan Ozen (2019) berpendapat bahwa *lean* telah dianggap menjadi suatu tools atau alat yang mampu merampingkan produksi, pendapat tersebut berlandaskan pikiran Krafcik (1988) yang berpendapat bahwa apabila dengan menerapkan *lean thinking* meskipun menggunakan lebih sedikit penggunaan sumber daya organisasi, tetap akan mendapatkan hasil dan produktivitas yang tinggi.

3. Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Penelitian ini akan mengangkat studi kasus pada siklus operasi produksi PT. XYZ yang bergerak dalam industri manufaktur sektor agroindustri yang dikelola oleh perusahaan *Mixed Ownership*, studi kualitatif pada PT. XYZ akan menunjukkan kekayaan data yang diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen dan observasi, kemudian akan dilakukan proses pengambilan tema pada hasil dari sumber data.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis dan mengevaluasi hubungan antara pengaruh Lean Waste Management terhadap siklus produksi secara lebih mendetail, penelitian ini menggunakan

teori *stakeholder* sebagai sudut pandang dimana PT. XYZ seharusnya memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholder* dengan menambah manfaat melalui pengurangan pemborosan, di lain

hal, peran pemangku kepentingan memberikan dukungan kepada PT. XYZ melalui aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada akhirnya teori ini akan menjelaskan menghubungkan antara evaluasi *waste management* dengan *lean thinking* terhadap siklus produksi PT. XYZ

4. Hasil dan Pembahasan

a. Siklus Produksi

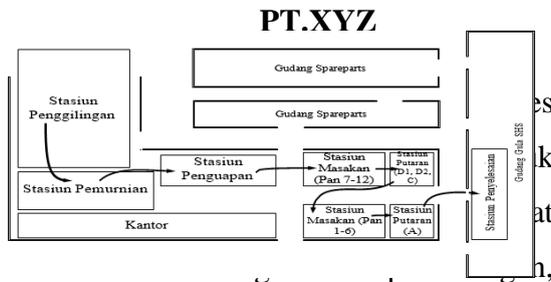
Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif.

1) Operasi Produksi

Pabrik gula merupakan pabrik yang memproduksi gula, bahan baku pembuatan gula berasal dari tebu. terdapat beberapa stasiun atau unit operasi untuk mengolah tebu agar menjadi gula yang siap jual

diantaranya, stasiun penggilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian.

Gambar 4.1 Layout Siklus Produksi



penumbukan dan penggilingan hingga maksimal. Output dari stasiun penggilingan ada dua yaitu nira mentah dan ampas tebu. Sistem masakan yang digunakan adalah sistem ACD, produk masakan A akan menghasilkan kristal gula A yang siap untuk dijual dan strop A berupa cairan yang masih mengandung gula sedangkan masakan C dan D berfungsi sebagai bibit dan mengoptimalkan pengambilan gula dari strop. Produk tetes akan keluar dari masakan D.

SHS 1				
Bulan	2020	2021	2022	2023
Mei		4,687	10,140	39,103
Juni	33,204	37,732	26,986	99,060
Juli	51,987	43,739	33,393	158,386
Agustus	26,218	44,920	58,596	
September	58,144	47,361	35,813	
Oktober	7,493	37,931	16,447	
Jumlah	177,046	216,370	181,375	296,549

Gambar 4.2 Perolehan Hasil Produksi

2) Kapasitas Produksi

Pembahasan tentang kapasitas

produksi menjadi krusial pada *Waste Management*, yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi. Pada dasarnya, kapasitas produksi mencerminkan kemampuan pabrik atau fasilitas untuk menghasilkan barang atau layanan dalam jangka waktu tertentu.

Mengelola pasokan tebu agar sesuai dengan kapasitas produksi merupakan bagian penting dari strategi ini. Tujuannya adalah untuk mencegah situasi di mana produksi harus dihentikan atau dimulai ulang secara berulang-ulang karena pasokan tidak memadai. Dalam hal ini, pengelolaan pasokan dan pengaturan produksi menjadi hal yang sangat krusial.

Tebu Digiling				
Bulan	2020	2021	2022	2023
Mei		117,493	293,730	735,193
Juni	605,597	639,375	523,167	973,359
Juli	821,076	697,490	598,054	885,553
Agustus	769,880	667,468	901,568	
September	855,312	656,311	502,827	
Oktober	103,187	505,164	203,696	
Jumlah	3,155,052	3,283,301	3,023,042	2,594,105

Gambar 4.3 Gambaran Kapasitas Produksi

3) Bahan Baku Produksi

Pabrik gula merupakan agro industri yang sangat bergantung pada produktivitas tanaman hal ini menjadikan kondisi alam sebagai tantangan tersendiri terkait pasokan bahan baku tebu karena kualitas kualitas tanaman tebu sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Tebu yang diperoleh dari

perkebunan tidak dapat mencukupi kebutuhan giling harian sehingga pabrik harus mencari tebu dari petani naik itu membeli tebu maupun bagi hasil gula dengan petani.

Kebutuhan tebu untuk bahan baku dasar produksi seringkali mengalami keterlambatan pasokan hingga menyebabkan *downtime* yang sangat menghambat bagi proses operasi produksi pabrik.

4) Limbah

Pada operasi produksi pabrik gula tentu akan menghasilkan limbah, hal yang dapat dikatakan limbah pada proses produksi terbagi akan 3 bagian utama yaitu pol ampas, pol blotong, dan pol tetes, pol ampas merupakan bentuk sisa hasil penggilingan tebu yang telah di produksi.

Bulan	Tebu Masuk			
	2020	2021	2022	2023
Mei		137,841	332,966	786,276
Juni	641,090	655,798	519,738	938,700
Juli	811,886	667,374	599,663	874,382
Agustus	767,109	668,692	878,384	
September	867,371	677,066	511,637	
Oktober	67,596	476,530	180,654	
Jumlah	3,155,052	3,283,301	3,023,042	2,599,358

Gambar 4.4 Gambaran Perolehan Bahan Baku Produksi

pada stasiun penggilingan untuk mendapatkan nira tebu, pol blotong adalah ampas sisa tebu yang berasal dari hasil pemurnian tebu yang kemudian mengalami filtrasi pada stasiun pemurnian untuk

memisahkan nira tebu dan kotoran hasil proses stasiun gilingan, sedangkan pol tetes adalah limbah yang berasal dari stasiun masakan yang tidak dapat di proses akibat tidak dapat mengalami proses kristalisasi gula

b. Waste Management pada Pabrik Gula PT. XYZ

Waste Management (WM), merupakan pendekatan yang dijalankan perusahaan untuk meminimalisir pemborosan, meningkatkan nilai barang yang akan dipasarkan, serta meningkatkan kualitas produksi. Metode *Lean Management* merupakan konsep yang ditemukan di Jepang pada abad 19 Masehi. Dengan sumber daya alam yang terbatas, Jepang mampu memimpin dunia industri dari tahun 1960 hingga saat ini (Melovic *et al*, 2016). Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, peneliti hendak memaparkan hasil penelitian bagaimana hasil evaluasi *waste management* pabrik gula PT. XYZ jika ditinjau dengan menggunakan *lean thinking*.

1) Defects

Kecacatan merupakan suatu hal yang pasti dalam sebuah produksi. Kecacatan dalam produksi gula merujuk pada cacat atau kekurangan yang terjadi selama proses produksi gula hingga hasil yang diperoleh,

yang mana hal tersebut dapat memengaruhi kualitas produk akhir. Kecacatan ini bisa muncul dari beberapa faktor. Bapak TRmenjelaskan, salah satu kasus yang dapat mengakibatkan kecacatan produk yang terjadi pada proses produksi gula di pabrik PT. XYZ yaitu kerusakan alat. Adanya kerusakan alat yang terjadi tentu akan mengakibatkan tidak normalnya proses produksi gula, sehingga akan mengakibatkan produk yang dihasilkan akan mengalami kecacatan.

2) *Overproduction*

Overproduction dalam siklus produksi gula bisa terjadi. Seperti yang dikatakan bapak Z4 selaku Koordinator quality control pernah menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya overproduction. Salah satunya merujuk pada situasi di mana bahan baku yang diperoleh pabrik ternyata sangat bagus.

Namun dalam operasi lapangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir produksi bahan mentah hingga bahan jadi menurun secara signifikan, akibat ketidakpastian cuaca dan lahan, hal ini membuat produksi pabrik gula PT. XYZ menurun.

3) *Waiting*

Berkaitan dengan “*waiting*” dalam

proses operasional, pada kasus pabrik gula PT. XYZ yaitu merujuk pada waktu yang dihabiskan untuk menunggu kedatangan bahan baku atau perbaikan kerusakan mesin yang dialami. Dalam menunggu produksi gulannya. Beberapa masalah yang menjadi *waiting* dalam proses produksi gula di Pabrik PT. XYZ yaitu peralatan dan kelangkaan bahan baku.

Upaya yang dilakukan Pabrik Gula PT. XYZ dalam mengatasi hal ini hanya sekedar melakukan perawatan seadanya dan menyediakan cadangan. Meskipun mereka melakukan perawatan dan menyediakan cadangan, mesin atau peralatan yang rusak memang masih dapat beroperasi, tetapi tentu saja efisiensinya akan berkurang.

TANGGAL	SEBAB - SEBAB BERHENTI
18-Mei-23	Berhenti Giling - Ekonomizer ketel 3 bocor
19-Mei-23	Berhenti Giling - Ganti klep turbin unigrator
21-Mei-23	Berhenti Giling - Listrik PLN mati
29-Mei-23	Berhenti Giling - Ganti stang hammer yang putus
21-Jun-23	Berhenti Giling - Perbaikan jalur nira kental VD no.04
01-Jul-23	Berhenti Giling - Pekerjaan Mollen Wash
17-Jul-23	Berhenti Giling - Pekerjaan penggantian baut suri-suri atas Gilingan I sisi timur
07-Agu-23	Berhenti Giling - Menunggu tebu masuk
13-Agu-23	Berhenti Giling - Menunggu tebu masuk
14-Agu-23	Berhenti Giling - Menunggu tebu masuk
15-Agu-23	Berhenti Giling - Menunggu tebu masuk

Gambar 4.5 Downtime Pabrik Gula PT. XYZ

4) *Non Utilized Talent*

Pada saat proses operasional produksi pada pabrik gula PT. XYZ, efisiensi pekerja atau tenaga kerja yang tersedia di pabrik gula PT. XYZ dimanfaatkan sepenuhnya atau tidak dioptimalkan.

Namun perekrutan karyawan yang dilakukan oleh PT. XYZ telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana tingkat manajemen diisi oleh para tenaga ahli dengan pengalaman diatas 5 tahun, dan untuk pegawai gudang gula dipilih secara musim produksi berlangsung

5) *Transportation*

Transportasi menjadi elemen yang memiliki peran sentral dalam mencapai efisiensi dan pengurangan pemborosan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, telah menggarisbawahi pentingnya menghitung dengan cermat jarak perjalanan dari lokasi penanaman tebu hingga titik tujuan akhir dalam proses produksi

Ketika jumlah tebu yang diangkut cukup besar, seperti yang terjadi saat ini, strategi Transportasi yang efektif menjadi semakin penting. Pernyataan narasumber mencerminkan bagaimana pengaturan waktu pemuatan tebu pada malam hari berbeda dengan di pagi hingga siang hari. Ini adalah contoh konkret dari penerapan prinsip *Lean Thinking* dalam

mengoptimalkan waktu dan sumber daya.

6) *Inventory*

Terkait dengan pengolahan gula dan penyimpanan didalam gudang gula, sejalan dengan konsep *inventory excess* pada *seven deadly waste*, maka setiap produk yang cacat harus segera diolah ulang, agar tidak terjadi pemborosan pada gudang gula.

Dengan memahami keterkaitan ini, langkah-langkah menuju produksi yang lebih efisien, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan dapat diambil.

7) *Motion*

Dalam konteks implementasi *Lean Thinking*, aspek *Motion* (Pergerakan Karyawan) memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai efisiensi dan penghematan dalam proses produksi. Konsep *Lean Thinking* berfokus pada identifikasi dan pengurangan pemborosan dalam segala bentuknya, termasuk pergerakan yang tidak perlu. *Motion* menjadi aspek yang signifikan dalam pembahasan ini, karena setiap pergerakan yang tidak memberikan nilai tambah pada produk akhir dapat berdampak pada pemborosan waktu, energi, dan sumber daya.

8) *Extra Processing*

Dalam konsep *Lean* mementingkan efisiensi operasional dan pengurangan

pemborosan, terdapat serangkaian strategi dan praktik yang harus diimplementasikan untuk memastikan setiap tahap siklus produksi berjalan optimal. Sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh narasumber, bahwa produksi shs 2 akan terus timbul akibat adanya kelalaian pada operator stasiun terkait.

5. Simpulan Dan Saran

a. Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi *waste management* dengan pemikiran *lean thinking* pada siklus produksi PT. XYZ yang merupakan perusahaan *mixed ownership*, kemudian penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengklasifikasikan jenis pemborosan berdasarkan 8 jenis *lean waste*. Menurut literatur sebelumnya 8 jenis *waste* berpengaruh secara dominan dalam siklus operasi

Pertama, untuk mengevaluasi *waste management* yang dilakukan oleh bapak Z1 selaku kepala pabrik gula pada PT. XYZ dapat disimpulkan dari segi pengambilan keputusan mengutamakan pendapatan hasil operasi produksi secara maksimum, hal itu didasarkan oleh produksi gula PT. XYZ mengalami kemunduran dari segi pendapatan bahan mentah produksi,

penurunan sebesar 30% dibanding tahun lalu akibat badai *el nino* yang menyebabkan musim kering berkepanjangan membuat kapasitas giling pada operasi produksi PT. XYZ mengalami kemunduran hingga menciptakan *waiting / downtime* yang tidak dapat diperkirakan waktunya, namun, pengaruh bapak Z1 sebagai pengambilan keputusan produksi gula secara terstruktur telah memberikan arahan langsung mengenai kegiatan produksi secara teratur kepada anggota pabrik, posisi bapak Z1 merupakan pilihan dari pemegang saham yang sejalan dengan teori *stakeholder* yaitu penekanan terhadap pemilihan berdasarkan kecakapan oleh pemangku kepentingan

untuk menjaga kinerja, keberlangsungan hidup organisasi dan eksistensi.

Kedua, penilaian terkait *waste management* dengan *lean thinking* telah menunjukkan bahwa terdapat *defects* dan *extra processing* berkala dalam setiap periode produksi yang terjadi, hal tersebut terjadi akibat kelalaian pengawasan dari chemiker dan operator stasiun yang bertugas sehingga timbul kecacatan produksi tersebut yang dinamakan gula SHS 2, kemudian pemborosan selanjutnya adalah pemborosan energi yang terjadi akibat *extra processing* untuk mendaur ulang gula SHS 2 menjadi gula SHS 1, sehingga menambah waktu produksi dan

waktu pengemasan ulang. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengaruh teori *stakeholder* yang mengutamakan kinerja yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menguntungkan segala pemangku kepentingan, terutama pemegang saham dan pemerintah.

Ketiga, pemborosan yang terjadi adalah meningkatnya biaya produksi akibat kerusakan mesin yang disebabkan oleh kesalahan dari luar, sehingga menimbulkan *downtime* yang membuat siklus operasi produksi mengalami hambatan, kemudian hal tersebut membuat pemborosan pada bahan pembantu. Hal tersebut timbul karena proses operasi produksi harus tetap berjalan meskipun terjadi kerusakan mesin pada satu stasiun, proses yang menciptakan ketidak efisienan pada produksi tersebut dilakukan agar nira tebu yang telah diolah sebelumnya tidak terbuang percuma. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori *stakeholder* sebagai akibat dari rendahnya keberlangsungan hidup perusahaan, namun sejalan dengan perekrutan karyawan sesuai pendapat bapak Z2 selaku wakil kepala pabrik gula, meskipun terjadi pemborosan namun para pekerja tetap dipilih berdasarkan kedekatan lokasi tinggal dengan pabrik PT. XYZ, dan tetap

memberikan kontribusi kepada petani dalam bentuk pupuk untuk menanam kembali tebu untuk periode produksi tahun depan.

Keempat, jenis waste lainnya adalah efek domino yang timbul akibat dari proses sebelumnya, proses *transport* akan mengalami *overcosting* akibat dari susahnyapengangkutan tebu dari ladang, hal tersebut juga menciptakan downtime karena secara normal proses pengangkutan tebu dari ladang menuju pabrik adalah dua kali dalam satu hari agar menghemat biaya. Akibat dari keterlambatan waktu produksi juga membuat *motion* karyawan lain juga berhenti hingga perbaikan selesai dilakukan, karena memang ketika produksi tidak berlangsung, maka pekerjaan pun menjadi tidak ada. Diluar daripada itu, kegiatan karyawan diluar stasiun gilingan yang memang selalu melaksanakan proses awal produksi memiliki waktu tunggu yang

panjang, seperti karyawan stasiun awal dan tengah yang bekerja hanya diawal hingga proses produksi selesai atau karyawan stasiun akhir dan gudang gula yang bekerja hanya diakhir hingga proses produksi selesai dalam satu *shift*. Namun sejalan dengan teori *stakeholder* sebagai bentuk eksistensi

b. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah dokumen yang diperoleh tidak semuanya

dapat disebar luaskan, seperti dokumen rancangan kerja anggaran perusahaan karena dokumen tersebut bersifat *confidential*.

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah untuk meneliti bagaimana penggunaan energi dan pemanfaatan serta pembuangan limbah dapat ditinjau dengan *lean waste management* pada perusahaan yang bergerak di bidang agro industri dan berstatus *mixed ownership company*.

c. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah dapat menambah referensi literatur dan kesenjangan literatur penelitian mengenai *Lean Thinking* dan *Waste Management* pada perusahaan *Mixed Ownership* yang bergerak dalam sektor manufaktur dan sub sektor bahan pangan utama.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan informasi bagi jajaran *top level management* PT. XYZ terkait bagaimana *Waste Management* dapat diterapkan di pabrik PT. XYZ. Sekaligus menjadi saran untuk meningkatkan produksi dan efisiensi, serta menjadi kajian bagi bagian pabrikasi PT. XYZ untuk dapat mengurangi *defects* dan *extra processing* untuk meningkatkan kapasitas hasil

produksi bagian pabrik PT. XYZ.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan.

Pertama terkait rendahnya pendapatan bahan baku tebu yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak mendukung seperti terjadi badai *el nino* yang dapat menurunkan produktivitas hasil tanaman hingga 30%, hal ini juga mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan naiknya harga bahan baku. Peneliti merekomendasikan untuk meninjau peningkatan rendemen agar tidak terjadi pengurangan terhadap hasil produksi yang diperoleh.

Kedua terkait cacat produksi yang disebabkan oleh kelalaian pengawasan chemiker dan operator serta adanya kemungkinan terjadinya kerusakan mesin pada proses masakan hingga penyelesaian. Peneliti merekomendasikan untuk membuat pengawasan optimal dari stasiun masakan dan putaran untuk menghasilkan produk yang optimal dengan rendahnya kecacatan.

Ketiga terkait masalah downtime atau waiting akibat kerusakan mesin yang disebabkan oleh overheat capacity ataupun disebabkan gangguan dari luar. Peneliti merekomendasikan untuk memastikan waktu produksi berjalan dengan optimal serta

selalu mempersiapkan sparepart pengganti untuk meredam downtime yang panjang.

Daftar Pustaka

- Anthony, R., Vijay Govindarajan, 2007, Management Control System, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Bader, *et. al.*(2019)." A study of the balancing of lean thinking and stakeholder salience in decision-making." *The TQM Journal* Vol. 32 No. 3, 2020 pp. 441-460 © Emerald Publishing Limited 1754-2731 DOI 10.1108/TQM-04-2019-0108
- Bryman, A., & Bell, E. (2011). *Business Research Methods* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Escuder, *et. al.* (2020) Can Lean eliminate waste in urban logistics? A field study. [International Journal of Productivity and Performance Management](#). ISSN: 1741-0401
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Gaspersz, V. 2007. *Lean Six Sigma for Manufacturing and Service Industries*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies* 2013, 40, 204–210.
- Hartanti, *et. al.* (2022) Lean Waste Identification in Higher Education Institution Using Waste Assessment Model [Management Systems in Production Engineering](#) 30(3):200-206. DOI:[10.2478/mspe-2022-0025](#)
- Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder

- theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275.
- Hussain, M., Malik, M., 2016. Prioritizing lean management practices in public and private hospitals. *J. Health Organisat. Manag.* 30 (3), 457-474.
- Kazancoglu, Y., & Ozkan-Ozen, Y. D. (2019). Lean in higher education: A proposed model for lean transformation in a business school with MCDM application. *Quality Assurance in Education*.
- Klein, *et. al.* (2020) "Management of lean waste in a public higher education institution." *Journal of Cleaner Production*.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125386>
- Krafcik, J. F. (1988). Triumph of the lean production system. *Sloan Management Review*, 30(1), 41-52.
- LeMahieu, P.G., Nordstrum, L.E., Greco, P., 2017. Lean for education. *Qual. Assur. Educ.* 25 (1), 74-90.
- Liker, J.K. and Wu, Y.C. (2006), "Japanese automakers, US suppliers and supply-chain superiority", *Sloan Management Review*, Vol 42 No. 1, pp 81-93
- Liker, J.K., & Morgan, D. (2006). *The Toyota Way Fieldbook A Particular Guide For Implementing Toyota's 4Ps*. New York. McGraw-Hill.
- Mason, J. 1996. *Qualitative Researching*. London : SAGE Publication.
- Melovic, B., & Mitrovic, S. (2016). The role of concept LEAN management in modern business. *MATEC Web of Conferences, IPICSE*.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Ohno, T., 1988. *Toyota Production System: beyond Large-Scale Production*. Productivity Press, Cambridge, MA
- Praharsi, *et. al.* (2021). [The application of Lean Six Sigma and supply chain resilience in maritime industry during the era of COVID-19](#) . *International Journal of Lean Six Sigma*

- Shah, R.; Ward, P.T. (2003). Lean manufacturing: Context, practice bundles and performance. *J. Oper.Manag.*, 21, 129–149
- Shah, R., Ward, P.T., 2007. Defining and developing measures of lean production. *J. Oper. Manag.* 25 (4), 785-805.
- Shingo, S. (1989), *A Study of the Toyota Production System*, Productivity Press, New York, NY
- Singh, B., Garg, S.K., Sharma, S.K., Grewal, C., 2010. Lean implementation and its benefits to production industry. *International Journal of Lean Six Sigma* 1 (2), 157-168.
- Sinha, N., Matharu, M. (2019) *A Comprehensive Insight into Lean Management : Literature Review and Trends*. *Journal of Industrial Engineering and Management*. *JIEM*, 2019-12(2): 302-317
- Souza, R.V.B., Carpinetti, L.C.R., 2014. A FMEA-Based Approach to Prioritize Waste Reduction in lean implementation. *Int. J. Qual. Reliab. Manag.* 31 (4), 346-366.
- Su-Jane Chen, Ming-Hsiang Chen, Hsu-Ling Wei. 2017. Financial performance of Chinese airlines: Does state ownership matter?. *Elsevier*. 33, 1-10
- Womack, J., Jones, D., & Roos, D. (1990). *The Machine that Changed the World*. New York: Rawson Associates.
- Womack, J and Jones, D. 1996. *Lean Thinking*. New York : Simon & Schuster
- Womack, J.P., Jones, D.T., 2003. *Lean Thinking e Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. The Free Press, New York, NY.
- Xiaoqian Zhang, Mingqiang Yu, Gaoquan Chenc. 2020. Does mixed-ownership reform improve SOEs' innovation? Evidence from state ownership. *Elsevier*. 6, 101450

Perhitungan Biaya Sekolah terhadap Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Studi Komparasi pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Al-Azhar Di Kabupaten Sleman)

Harry Fadholi Lakadjo*¹, Rusdi Akbar²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perhitungan biaya sekolah dengan analisis cost volume profit dalam menentukan break even point pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kecukupan dan kebutuhan dana bantuan operasional sekolah daerah yang diterima pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah dari masing-masing SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen lembar validasi pertanggungjawaban dana BOS reguler, dana BOSDA, dan dokumen lainnya yang sah pada tahun 2022. Temuan penelitian dari hasil perhitungan biaya yang dilakukan bahwa break even point pada SMP Negeri 4 Pakem sebesar Rp788.205.764 dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebesar Rp9.708.375.55. Penerimaan dana BOSDA untuk SMP Negeri 4 Pakem dinilai masih kurang untuk membiayai 8 standar nasional pendidikan, sedangkan untuk SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dinilai sudah cukup untuk membiayai program dan kegiatan sekolah. Selain itu, dalam proses perhitungan biaya terbagi dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. Kontribusi penelitian ini adalah dapat menambah literatur dan pemahaman bagi kepala sekolah dan bendahara untuk melakukan perhitungan biaya sekolah yang cermat.

Kata Kunci: *Break even point, cost volume profit, dana BOSDA, perhitungan biaya sekola*

Pendahuluan

Dunia pendidikan tidak terlepas dari komponen pembiayaan yang berfungsi untuk menunjang jalannya sistem pendidikan (Prihatin *et al.*, 2022). Pembiayaan pada sektor pendidikan bukan hanya terkait pendidikan itu dibiayai, tetapi ketersediaan dan pengalokasian anggaran menjadi penting untuk diperhatikan (Handayani & Sukirno, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengamanatkan wajib mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun. Sebagai keseriusan mengoptimalkan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah mengadakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Hadiyanto *et al.*, 2019). Tujuan khusus dari dana BOS untuk membebaskan pungutan kepada setiap siswa (Hadiyanto *et al.*, 2019). Namun, menurut Sugihartono (2022) di Jawa Tengah masih terjadi pungutan liar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Purworejo dan Kabupaten

Magelang. Kasus yang sama ditemukan di Jawa Timur bahwa terjadi pungutan untuk biaya seragam sekolah mencapai Rp2,34 juta (Kompas, 2023).

Sumber pendanaan program BOS sebenarnya dapat dibedakan menjadi BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan BOS dari pemerintah kota/kabupaten atau yang disebut BOS daerah (BOSDA) (Hadiyanto *et al.*, 2019). Menurut Basuni & Halim (2023), munculnya program BOSDA menuntut pemerintah daerah untuk melengkapi kekurangan pembiayaan dana BOS dari pemerintah pusat. Namun, menurut Aflaha *et al.*, (2021) menyatakan dampak dari pelimpahan kebijakan tentang pendidikan kepada pemerintah daerah membuat para pemangku kebijakan kesulitan dalam menghitung komponen biaya pendidikan yang bisa berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan.

Dalam perhitungan biaya, Anhari *et al.*, (2020) menyebutkan dengan menggunakan informasi rincian biaya bisa memperkirakan kebutuhan anggaran untuk sekolah. Informasi rincian biaya yang akurat bisa dilakukan dengan menggunakan metode *variable costing* yang memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Gean & Gean (2015) salah satu metode untuk melakukan perhitungan

biaya dengan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel adalah analisis *cost volume profit* (CVP). Dasar pemikiran dari analisis CVP ini untuk melihat reaksi dan hubungan antara aktivitas, biaya, volume, dan keuntungan yang informasi antara variabel ini dapat berguna untuk pengambilan keputusan.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak hanya diurus dari pihak pemerintah, tetapi melibatkan pihak swasta. Menurut Zancajo *et al.*, (2022) sekolah swasta yang memperoleh dana dari bantuan pemerintah dapat memicu dinamika persaingan dengan sekolah negeri. Maka dari itu, perhitungan biaya sekolah penting dilakukan untuk sekolah negeri dan swasta agar lebih mengedepankan aspek keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Menurut Hayatunnida & Shaleh (2022) salah satu daerah yang bisa dijadikan *pilot project* pendidikan dari sisi pembiayaan dan administrasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud, saat ini DIY memiliki jumlah sekolah sebanyak 7.771 dengan pembagian 1.824 sekolah negeri dan 5947 sekolah swasta. Khusus untuk Kabupaten Sleman dana BOS reguler tahun 2022 sebesar Rp182.357.400.317, pada tahun 2021 Rp186.312.872.000 dan pada tahun 2020 Rp184.106.750.000. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di DIY, Kabupaten Sleman sebagai penerima BOS reguler terbesar (Kemdikbud, 2022) dan memperoleh tambahan dana BOSDA berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2022.

SMP Negeri 4 Pakem salah satu sekolah negeri di Kabupaten Sleman yang dinilai sebagai sekolah favorit oleh masyarakat karena memiliki keunggulan dan terakreditasi A dari Kemdikbud, tetapi secara pendapatan hanya terbatas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan sekolah swasta favorit di masyarakat, SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta merupakan sekolah islam terkenal di Yogyakarta dengan akreditasi A dari Kemdikbud, namun secara sumber pendapatan memperoleh Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari setiap siswa dan terbuka peluang menerima tambahan dana

BOSDA melalui mekanisme hibah yang diatur dalam Perbup Sleman Nomor 24 Tahun 2022.

Pembiayaan pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta memang menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi, secara peraturan perundang-undangan, kedua sekolah ini berhak mendapat dana yang bersumber dari pemerintah, namun untuk mewujudkan BOSDA yang berkeadilan, pemerintah Kabupaten Sleman harus memperhatikan alokasi dana BOSDA berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah. Dengan demikian, cara untuk memperhatikan kecukupan dan kebutuhan dana untuk sekolah dengan melakukan analisis perhitungan biaya sekolah untuk menentukan *break even point* pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta agar dana BOSDA yang diterima dinilai kurang atau cukup untuk membiayai kebutuhan dari masing-masing sekolah.

Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori Institusional Teori

Institusional teori atau teori kelembagaan pertama kali dikenalkan oleh DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. tahun 1983. Teori ini menjelaskan bahwa konsep yang diterapkan oleh satu organisasi cenderung sama dengan organisasi yang berbeda. Menurut Scott (1995), teori kelembagaan merupakan teori sosiologi yang menjelaskan struktur organisasi. Dalam teori ini, suatu organisasi mengadopsi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan administrasinya, tetapi masih sesuai dengan kode etik suatu organisasi yang kemudian bisa mengarah pada legitimasi dan dukungan eksternal dari organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Seiring perkembangan zaman, organisasi yang sudah dikatakan mapan dalam pengelolaannya, cenderung mengarah pada keseragaman (Sofyani et al., 2018). Istilah yang tepat untuk menggambarkan proses dari keseragaman organisasi adalah isomorfisme (Ahyaruddin & Akbar, 2018).

Menurut DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan konsep isomorfisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: isomorfisme kompetitif dan isomorfisme institusional. Isomorfisme kompetitif terkait dengan efisiensi, ketika organisasi bersaing, mereka lebih cenderung memakai cara yang lebih murah, lebih baik, dan efisien untuk kepentingan kompetisi (Ahyaruddin & Akbar, 2018). Isomorfisme institusional merupakan alat yang digunakan untuk menunjang

pemahaman tentang politik serta prosedur dalam kehidupan berorganisasi (Sofyani et al., 2018). DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi terdapat tiga isomorfisme institusional, yaitu: isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif.

- 1) Isomorfisme koersif terjadi ketika pihak eksternal memberikan tekanan pada organisasi dengan cara mengadopsi keyakinan yang sama dengan organisasi lain untuk mempertahankan legitimasi atau agar dianggap sebagai organisasi yang efektif dalam memenuhi tugasnya (Sofyani et al., 2018). Bentuk tekanan yang dialami seperti paksaan, bujukan, ajakan untuk bergabung dalam kolusi.
- 2) Isomorfisme mimetik terjadi ketika organisasi mengadopsi atau meniru praktik-praktik yang dilakukan dari organisasi yang dianggap sukses dan dibuktikan dengan rekam jejak serta pencapaiannya (Sofyani et al., 2018). Peniruan dapat terjadi berdasarkan informasi di antara karyawan atau melalui rekomendasi dari konsultan yang dipilih oleh organisasi tersebut.
- 3) Isomorfisme normatif terjadi ketika sebuah organisasi mengadopsi nilai-nilai atau norma yang sama dengan organisasi lain dalam lingkungan yang sama untuk mengembangkan profesionalismenya (Sofyani et al., 2018).

Cost Volume Profit

Cost volume profit (CVP) merupakan bagian dari perhitungan *unit cost* dalam akuntansi manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi (Lulaj & Iseni, 2018). Menurut Gean & Gean (2015) analisis CVP suatu metode untuk menangkap reaksi dan hubungan antara biaya, volume, dan keuntungan. Analisis CVP salah satu cara yang paling efektif dalam memperkirakan biaya, merealisasikan target laba, dan menganalisis keputusan perusahaan (LE et al., 2020). Tujuan dari analisis CVP adalah untuk menentukan output yang menambah nilai bisnis, menekan dampak dari biaya tetap, titik impas, serta target keuntungan

yang bisa menentukan volume penjualan dan perkiraan pendapatan (LE et al., 2020).

Menurut Purwanto & Watini (2020) biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat pada masa kini dan masa yang akan datang. Dalam analisis CVP, biaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya

variabel (DALCI, 2005). Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan, sebaliknya, biaya variabel merupakan biaya yang bisa berubah seiring dengan perubahan volume penjualan (Phillips, 1994).

Menurut F. D. Putra (2017) volume penjualan merupakan total dari hasil penjualan yang dicapai oleh suatu unit bisnis dalam periode tertentu. Dalam analisis CVP, volume penjualan merupakan satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi biaya variabel dan pendapatan. Menurut Hassanah & Daud (2019) laba merupakan selisih antara total penghasilan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan pada suatu kegiatan usaha, sehingga laba dalam analisis CVP merupakan total penjualan dikurangi dengan total biaya. Hubungan antara biaya, volume, dan laba dalam analisis CVP dapat digunakan untuk menghitung *break event point*, komposisi biaya untuk memaksimalkan margin kontribusi yang tujuannya mengantisipasi kerugian dari unit usaha.

Break Even Point

Analisis CVP dapat didefinisikan dalam istilah yang lebih sempit, yaitu berkaitan dengan cara menghitung *break event point* atau titik impas (Abdullahi *et al.*, 2017). Titik impas adalah keadaan operasional perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian (Bastomi *et al.*, 2021). Dengan kata lain, titik impas hanya bisa menutupi semua biaya tanpa membuat suatu keuntungan (Abdullahi *et al.*, 2017).

Perhitungan *break event point* merupakan inti dari analisis CVP yang berguna mencapai tingkat volume yang diperlukan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Untuk melengkapi perhitungan *break even point*, perhitungan *margin of safety* (MoS) juga penting dilakukan agar bisa mengetahui presentase penurunan pendapatan maksimum harus berada pada taraf tertentu atas hasil dari penjualan suatu produk (Devi *et al.*, 2023).

Perhitungan *break event point* dan *margin of safety* dapat dihitung menggunakan rumus (Bastomi *et al.*, 2021):

Break-even point in unit:

$$\frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Selling Price per Unit} - \text{Variable Cost per Unit}}$$

Break-event poin in rupiah:

$$\frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin Ratio}}$$

Margin Of Safety in rupiah:

$$\text{Current sales} - \text{Sales Reached BEP Rp}$$

MoS percentage:

$$\frac{\text{Margin Of Safety}}{\text{Sales}}$$

Menurut Osahon & Ph (2014) salah satu pendekatan untuk menentukan *break event point* adalah pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan selisih antara total pendapatan dan total biaya variabel. Margin kontribusi merupakan konsep dalam analisis CVP yang berkontribusi terhadap laba bersih setelah biaya tetap tertutupi (DALCI, 2005).

Selanjutnya, dalam menentukan rasio margin kontribusi dapat dihitung dengan margin kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Penentuan rasio margin kontribusi berfungsi sebagai presentase dari besaran margin kontribusi untuk menutupi biaya tetap serta bagian dari rumus untuk mencari titik impas dalam satuan rupiah. Pendekatan margin kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus:

Contribution Margin:

$$\frac{(\text{selling price} - \text{variable cost per unit}) \times \text{quantity sold}}{\text{Total revenue} - \text{total variable cost}}$$

Contribution Margin per Unit:

$$\text{Variable cost per unit} - \text{selling price}$$

Margin Contribution Ratio:

$$\frac{\text{Contribution Margin}}{\text{Total Revenue}}$$

Penggunaan analisis *cost volume profit* pada penelitian ini penekanannya lebih pada cara menghitung biaya sekolah dengan pendekatan margin kontribusi dan dibandingkan dengan dana BOSDA yang diterima dari masing-masing sekolah. Ketika informasi biaya bisa diidentifikasi dengan baik sehingga bisa menentukan titik impas, maka sekolah bisa merencanakan anggaran sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran yang akan diterima dari dana BOSDA.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

(BOSDA)

Dana BOS di Indonesia dinilai mampu menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak (Hadiyanto *et al.*, 2019). Seiring dengan berjalannya program BOS, Akbar (2016) menyatakan program BOS yang dijalankan oleh pemerintah dinilai belum efektif karena masih mengalami masalah seperti pencairan dana yang terlambat, penyelewengan dana, dan belum maksimalnya penyaluran dana BOS, namun (Andi *et al.*, 2015) menilai program BOS masih dijalankan karena dianggap signifikan dalam membantu penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada Pasal 81 anggaran pendidikan dari APBD sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah. Sebagai perwujudan alokasi anggaran pendidikan 20% untuk setiap daerah, pemerintah daerah dapat menjadikan dana BOS daerah (BOSDA) sebagai program yang menunjang urusan penyelenggaraan pendidikan 20% sesuai dengan kemampuan daerah. Menurut Suheni *et al.*, (2018) tujuan dari dana BOSDA hanya untuk memenuhi kebutuhan pelaku pendidikan agar merasa puas dengan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan.

Pengelolaan dana BOSDA merupakan proses pengelolaan keuangan yang ideal, dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Anugrah *et al.*, 2022). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adanya kewenangan bagi pemerintah daerah mengadakan program BOSDA mengakibatkan campur tangan pemerintah pusat menurun jika diikuti dengan kemandirian sekolah dalam manajemen yang baik (S. Rahayu *et al.*, 2015).

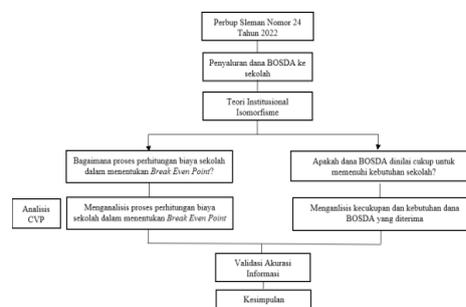
Selain itu, otonomi sekolah dianggap dapat merubah tujuan dari pendidikan, karena dianggap pendidikan ada unsur politis (S. Rahayu *et al.*, 2015). Menurut (Broadbent & Laughlin, 1998) pendidikan tidak lagi dinilai dari prosesnya, melainkan dinilai dari sisi pengelolaan keuangan dan laporan hasil akhir siswa.

Berdasarkan objek penelitian di daerah

kabupaten Sleman, pemda Sleman membuat Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 tahun 2022 tentang dana BOSDA. Peraturan ini lebih menekankan penyaluran dana BOSDA pada jenjang pendidikan dasar yaitu, SD, Madrasah Ibtida'iyah, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah. Pada jenjang pendidikan dasar negeri bertujuan membebaskan pembiayaan pendidikan pada peserta didik, sedangkan pada jenjang pendidikan dasar untuk swasta bertujuan membantu pembiayaan operasional sekolah untuk meringankan biaya bagi peserta didik.

Rerangka Konseptual

Penerapan analisis perhitungan biaya pada sekolah negeri dan swasta penting dilakukan agar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan bisa dikelola secara efektif. Apabila penerapan analisis biaya di sekolah diterapkan dengan baik, pemerintah daerah sebagai pemberi dana BOSDA bisa melihat kebutuhan anggaran yang diperlukan dari sisi pengeluaran sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan metode analisis *cost volume profit* dalam menentukan *break even point* di sekolah digunakan untuk melihat hubungan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima. Gambar 2.1 merupakan rerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 1. Rerangka Konseptual

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014) metode kualitatif adalah sebuah rancangan untuk mendapatkan pemahaman permasalahan dari beberapa individu atau sekelompok orang. Penelitian ini berfokus pada perhitungan biaya sekolah dengan menggunakan analisis *cost volume profit* dalam menentukan *break even point* terhadap penerimaan dana BOSDA pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta di Kabupaten Sleman.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan melalui objek penelitian dengan wawancara semi terstruktur kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung untuk mendukung data primer terkait laporan realisasi penggunaan anggaran sekolah yaitu lembar validasi pertanggung jawaban dana BOS reguler dan dana BOSDA tahun 2022.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu teknik analisis *cost volume profit* (CVP) yang digunakan untuk menghitung *break event point* dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis dengan metode CVP pada penelitian ini digunakan untuk menghitung *break event point* dari masing-masing SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Menurut (Sholekhah *et al.*, 2018) bagian penting dari analisis CVP adalah penentuan titik impas. Tahapan dari analisis CVP, diantaranya yaitu (1) mengidentifikasi dan menghitung total pendapatan, (2) mengidentifikasi biaya yang terjadi, (3) mengelompokkan biaya berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel, (4) menghitung margin kontribusi, dan (5) menghitung *break even point* dan *margin of safety*. Pada tahap analisis data kualitatif, menurut (Hennink *et al.*, 2020) menyatakan siklus analitis terbagi dalam 6 tahap, yakni (1) pengembangan kode, (2) deskripsi data, (3) perbandingan, (4) kategorisasi, (5) konseptualisasi, dan (6) pengembangan teori. Teknik pengujian validitas data yang dilakukan dalam penelitian adalah triangulasi dan *memberchecking*. sedangkan uji reliabilitas kualitatif dilakukan dengan mendokumentasikan prosedur penelitian secara rinci.

Hasil Dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam kepada responden yang terkait langsung dengan perhitungan biaya sekolah dan penerima dana BOSDA di SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah

yang berperan dalam tugas dan fungsi sebagai pembuat keputusan untuk penggunaan dana BOS reguler dan BOS Daerah dan Bendahara Sekolah yang berperan dalam tugas dan fungsi pencatatan, perhitungan biaya sekolah, hingga pelaporan dana BOS reguler yang diterima dari pemerintah pusat dan dana BOS Daerah yang diterima dari pemerintah daerah.

Selain data primer, data sekunder juga dikumpulkan untuk menghitung *break event point* atau titik impas dari SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dengan menggunakan analisis *cost volume profit*. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah data historis dari laporan pertanggungjawaban dana BOS reguler dan dana BOS daerah Kabupaten Sleman tahun 2022 untuk masing-masing SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta mengumpulkan data tambahan berupa data Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang sumbernya berasal dari iuran per siswa.

Cost Volume Profit dalam Menentukan Break Even Point pada SMP Negeri 4 Pakem

1) Identifikasi dan menghitung total pendapatan
Sumber pendapatan yang diterima oleh SMP Negeri 4 Pakem dengan jumlah siswa 478 berasal dari (1) pemerintah pusat berupa dana BOS reguler pada tahun 2022 sebesar Rp522.890.226 dan (2) dari pemerintah daerah berupa dana BOS daerah sebesar Rp266.955.000 serta dari (3) orang tua/wali murid berupa sumbangan sukarela. Informasi besaran dana sumbangan sukarela tidak dapat diperoleh karena SMP Negeri 4 Pakem tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait dana sumbangan sukarela. Jadi total keseluruhan

pendapatan SMP Negeri 4 Pakem yang diperoleh sebesar Rp789.845.226.

2) Identifikasi dan pengelompokan biaya
Informasi terkait biaya yang terjadi di SMP Negeri 4 Pakem diperoleh langsung melalui data sekunder dalam bentuk lembar validasi pertanggungjawaban dana BOS reguler dan dana BOS daerah tahun 2022. Biaya yang terjadi pada SMP Negeri 4 Pakem diklasifikasi menjadi lima bagian, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja persediaan, (3) belanja barang dan jasa, (4) belanja modal peralatan dan mesin, dan (5) belanja aset tetap lainnya. Berikut tabel pengelompokan jumlah biaya tetap dan biaya variabel

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

berdasarkan rekapitulasi biaya yang terjadi.

Tabel 1. Pengelompokan Biaya SMP Negeri 4 Pakem

Rekapitulasi biaya	Biaya tetap	Biaya variabel
Belanja pegawai	Rp14.000.0000	
Belanja persediaan	Rp2.853.000	Rp52.869.093
Belanja barang dan jasa	Rp434.248.192	Rp91.607.078
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp1.000.036	Rp134.440.828
Belanja aset tetap lainnya		Rp57.485.800
	Rp452.501.228	Rp336.402.799
Total Biaya	Rp788.904.027	

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, total biaya yang terjadi di SMP Negeri 4 Pakem sebesar Rp Rp788.904.027 dengan biaya tetap Rp452.501.228 dan biaya variabel Rp Rp336.402.799.

3) Perhitungan margin kontribusi

Pada tahap ini, tidak hanya menghitung margin kontribusi saja, melainkan menghitung margin kontribusi per siswa dan rasio margin kontribusi.

a) Margin kontribusi:

$$\begin{aligned} & \text{total pendapatan} - \text{total biaya variabel} \\ & \text{Rp789.845.226} - \text{Rp336.402.799} \\ & = \text{Rp453.442.427} \end{aligned}$$

b) Margin kontribusi per siswa:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{margin kontribusi}}{\text{jumlah siswa}} \\ & \frac{\text{Rp453.442.427}}{478} = \text{Rp948.624} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) Rasio margin kontribusi:} & \\
 \frac{\text{margin kontribusi}}{\text{total pendapatan}} & \\
 \frac{\text{Rp453.442.42}}{\text{Rp789.845.22}} & = \\
 \frac{7}{6} & = 0,57
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) MoS Rp} & = \text{current sales-BEP Rp} \\
 & = \text{Rp789.845.226} - \\
 & \text{Rp788.904.027} \\
 & = \text{Rp1.639.461}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, angka dari margin kontribusi sebesar Rp453.442.427 ini menandakan bahwa perolehan pendapatan sekolah mampu menutupi biaya-biaya variabel, untuk angka dari margin kontribusi per siswa sebesar Rp948.624 menunjukkan bahwa biaya-biaya yang sifatnya berhubungan langsung dengan jumlah siswa masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan per siswa yang diterima, sedangkan untuk angka dari rasio margin kontribusi sebesar 0,57 menandakan bahwa 57% dari total pendapatan mampu menutupi total biaya tetap yang ada di SMP Negeri 4 Pakem.

- 4) *Break even point dan margin of safety*
Dalam analisis *cost volume profit*, tahap terakhir dan terpenting adalah menentukan *break even point* (BEP) dari SMP Negeri 4 Pakem. Penentuan *break even point* dibagi menjadi dua, *break even point* in siswa dan *break even point* in rupiah, sedangkan perhitungan *margin of safety* (MoS) berguna untuk menentukan bahwa batas aman dari penurunan pendapatan

$$\begin{aligned}
 \text{a) BEP siswa} & \\
 & = \\
 \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin/Unit}} & \\
 & = \frac{\text{Rp452.501.228}}{\text{Rp948.624}} \\
 & = 477
 \end{aligned}$$

Jika SMP Negeri 4 Pakem ingin mengalami kondisi impas, jumlah siswa yang harus dimiliki sebanyak 477 siswa. Jika dibandingkan dengan kondisi jumlah siswa sesungguhnya berada pada jumlah 478 siswa.

$$\begin{aligned}
 \text{b) BEP Rp} & \\
 & = \\
 \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin Ratio}} & \\
 & = \frac{\text{Rp452.501.228}}{0,57} \\
 & = \text{Rp788.205.764}
 \end{aligned}$$

Jika SMP Negeri 4 Pakem ingin

mengalami kondisi impas, total pendapatan yang harus diperoleh adalah Rp788.205.764. Jika dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya, total pendapatan sebesar Rp789.845.226.

Jadi, hasil perhitungan MoS memberikan rencana besaran pendapatan yang dapat mengalami penurunan maksimum sebesar Rp1.639.461, tetapi angka ini belum memperhitungkan realisasi dana komite yang bisa berpengaruh terhadap proses analisis *break even point*.

Cost Volume Profit Dalam Menentukan Break Even Point pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta

- 1) Identifikasi dan menghitung total pendapatan
Sumber pendapatan yang diterima SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dengan jumlah siswa 391 siswa untuk tahun 2022 terdiri dari (1) paket pendukung kegiatan pembelajaran (PPKP) sebesar Rp3.680.150.000, (2) iuran OSIS Rp126.920.000, (3) iuran jamiyyah Rp95.750.000, (4) iuran bulanan Rp6.334.200.000, dan (5) BOS Reguler dan (6) BOS Daerah Rp212.160.000. jadi total keseluruhan pendapatan yang diterima oleh SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebesar Rp10.904.580.000.
- 2) Identifikasi dan pengelompokan biaya Informasi biaya yang terjadi pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dapat diidentifikasi berdasarkan iuran yang dipungut dari setiap siswa yaitu, (1) Paket Pendukung Kegiatan Pembelajaran (PPKP), (2) iuran OSIS, (3) iuran jamiyyah, dan (4) iuran bulanan, serta biaya yang terjadi berdasarkan (5) BOS reguler dan (6) BOS daerah tahun 2022. Berikut tabel pengelompokan jumlah biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan rekapitulasi biaya yang terjadi.

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

Tabel 2. Pengelompokan Biaya SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta

Rekapitulasi biaya	Biaya tetap	Biaya variabel
Iuran PPKP dan OSIS	Rp2.564.274.000	Rp317.730.000
Iuran jamiyyah	Rp5.000.000	Rp85.100.000
Iuran bulanan	Rp6.334.200.000	
Belanja pegawai	Rp9.300.000	
Belanja barang dan jasa	Rp233.598.246	Rp181.587.541
Belanja modal	Rp1.650.000	Rp321.783.844
	Rp6.901.478.246	Rp3.152.745.385
Total Biaya	Rp10.054.223.631	

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, total biaya yang terjadi di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebesar Rp10.054.223.631 dengan biaya tetap Rp6.901.478.246 dan biaya variabel Rp3.152.745.385.

3) Perhitungan margin kontribusi

a) Margin kontribusi:
 total pendapatan - total biaya variabel
 Rp10.904.580.000 -
 Rp3.152.745.385
 =
 Rp7.751.834.615

b) Margin kontribusi per siswa:

$$\frac{\text{margin kontribusi}}{\text{jumlah siswa}} = \frac{Rp7.751.834.615}{391} = Rp19.825.664$$

c) Rasio margin kontribusi:

$$\frac{\text{margin kontribusi}}{\text{total pendapatan}} = \frac{Rp7.751.834.615}{Rp10.904.580.000} = 0,71$$

jumlah siswa, sedangkan untuk angka dari rasio margin kontribusi sebesar 0,71 menandakan bahwa 71% dari total pendapatan sekolah mampu menutupi biaya tetap yang ada di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta.

4) Break even point dan margin of safety

a)
$$\text{BEP siswa} = \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin/Unit}} = \frac{Rp6.901.478.246}{Rp19.825.664} = 348$$

Jika SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta ingin mengalami kondisi impas, jumlah siswa yang harus dimiliki hanya sebanyak 348 siswa. Jika dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya, jumlah siswa SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sebanyak 391 siswa, artinya angka ini sudah melewati batas impas dari yang dibutuhkan.

b)
$$\text{BEP Rp} = \frac{\text{Total Fixed Cost}}{\text{Contribution Margin Ratio}} = \frac{Rp6.901.478.246}{0,71} = Rp9.708.375.551$$

Jika SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta ingin mengalami kondisi impas, total pendapatan hanya sebesar Rp9.708.375.551. Jika dibandingkan dengan kondisi pendapatan yang sesungguhnya sebesar Rp10.904.580.000, artinya perolehan angka titik impas ini menunjukkan bahwa SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sudah mencapai pendapatan di atas titik impas.

c)
$$\text{MoS Rp} = \text{current sales} - \text{BEP Rp} = Rp10.904.580.000 - Rp9.708.375.551 = Rp1.196.204.449$$

Jadi, hasil perhitungan MoS memberikan

rencana besaran pendapatan yang dapat mengalami penurunan maksimum sebesar

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

Berdasarkan hasil perhitungan, angka dari margin kontribusi sebesar Rp7.751.834.615 ini menandakan bahwa perolehan pendapatan sekolah dikatakan mampu menutupi biaya-biaya variabel yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan dari iuran PPKP, iuran OSIS, iuran *jamiyyah*, serta BOS reguler dan BOS daerah, untuk angka dari margin kontribusi per siswa sebesar Rp19.825.664 menunjukkan biaya-biaya yang sifatnya berhubungan langsung dengan Rp1.196.204.449 atau 11% dari total pendapatan sesungguhnya.

Proses Perhitungan Biaya Sekolah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2022 telah diuraikan tentang proses penggunaan dana BOSDA oleh SMP negeri dan swasta. Aktivitas tersebut diantaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi. Penelitian ini berfokus pada proses perhitungan biaya sekolah untuk menentukan *break even point* dari masing-masing sekolah dengan analisis *cost volume profit*. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, proses perhitungan biaya sekolah dilakukan berdasarkan tiga tahap, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan.

- 1) Pada proses perencanaan biaya, SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta merencanakan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang berarti sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
- 2) Pada proses pengelolaan biaya, SMP Negeri 4 Pakem mengeluarkan biaya yang bersumber dari dana BOSDA berdasarkan klasifikasi biaya 8 standar nasional pendidikan (SNP). Selain itu, penggunaan dana BOSDA dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan dana BOS reguler. Pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta penggunaan dana BOSDA sama seperti SMP Negeri 4 Pakem berdasarkan 8 SNP, namun penggunaan dana yang bersumber dari dana iuran didasarkan pada klasifikasi biaya berdasarkan kegiatan yang direncanakan. Selain itu, penggunaan dana iuran ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan dana BOSDA.
- 3) Pada proses pelaporan biaya, SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26

Yogyakarta membuat lembar validasi pertanggungjawaban dana BOSDA berdasarkan 8 SNP dan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Namun, masalah yang terjadi di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta pada saat pelaporan sering mengalami keterlambatan pemberian dana BOSDA.

Kebutuhan dan Kecukupan Dana BOSDA

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis *cost volume profit*, perolehan *break even point* di SMP Negeri 4 Pakem yaitu sebesar 477 siswa dan Rp788.205.764. Angka ini menunjukkan jika SMP Negeri 4 Pakem ingin mengalami kondisi tidak kekurangan atau tidak kelebihan dana untuk membiayai sekolahnya, jumlah siswanya harus 477 dan total pendapatannya Rp788.205.764. Namun, perolehan *break even point* ini belum memperhitungkan biaya yang timbul berdasarkan sumber pendapatan yang berasal

dari orang tua yaitu sumbangan sukarela atau dana komite. Dengan kata lain, analisis CVP dalam menentukan *break even point* pada SMP Negeri 4 Pakem belum memperhitungkan dana komite.

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, pendanaan dari dana komite dinilai adanya unsur ketidakpastian. Dari sisi waktu dan nominal tidak bisa ditentukan oleh pihak sekolah serta dari pihak sekolah tidak bisa melakukan penagihan kepada wali murid. Sehingga, berdasarkan tambahan data wawancara pada SMP Negeri 4 Pakem, dana BOSDA yang diberikan dinilai kurang untuk membiayai sekolah. Dampak dari dana BOSDA yang dinilai kurang dirasakan oleh SMP Negeri 4 Pakem pada pembayaran gaji guru honorer. Pasalnya, pembiayaan untuk gaji guru honorer banyak di biayai dari dana BOSDA, namun karena kurangnya dana yang dimiliki mengakibatkan sekolah kesulitan untuk membayar hak dari gaji guru honorer tersebut.

Pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta diperoleh hasil perhitungan titik impas yaitu 348 siswa dan Rp9.708.375.551. Hasil dari angka ini sudah memuat keseluruhan data yang dibutuhkan. Jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp10.904.580.000, angka ini sudah melewati dari kebutuhan biaya yang dibutuhkan. Bahkan ketika dikurangi dengan penerimaan dana BOSDA, SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta masih dikategorikan mampu untuk membiayai sekolahnya. Kepala sekolah SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta sudah melakukan diskusi dengan para wali murid sebagai donator tetap untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan sekolah, SMP Islam Al-Azhar

26 Yogyakarta tidak merasa terbebani terhadap pembiayaan yang akan dilakukan selama periode satu tahun anggaran. Oleh karena itu, kebutuhan dan kecukupan dana BOSDA yang diterima oleh SMP Islam Al- Azhar 26 Yogyakarta dinilai cukup dan membantu untuk membiayai sekolah.

Pengembangan Teori

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari kedua sekolah SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta terdapat isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif, sedangkan

untuk isomorfisme mimetik peneliti tidak memperoleh hasil yang konkrit karena perhitungan biaya sekolah didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah yang artinya sekolah diberikan hak untuk melakukan perhitungan biaya dari perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.

Perhitungan biaya sekolah di SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), namun dalam prinsip MBS ini kedua sekolah ini tetap menyesuaikan aturan yang ditentukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Aturan yang diberikan oleh Kabupaten Sleman yaitu, mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.2/Kep.KDH/A/2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun Anggaran 2022. Juknis dan SHBJ ini yang menjadi pedoman bagi SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta untuk melakukan proses perhitungan biaya.

Selain isomorfisme koersif yang terjadi pada SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, terdapat juga isomorfisme normatif pada kedua sekolah ini. isomorfisme yang terjadi pada kedua sekolah ini adalah pelatihan dari Dinas Pendidikan terkait pengelolaan dana BOSDA. Pelatihan ini ditujukan kepada masing-masing bendahara sekolah atau kepala sekolah sebagai penerima dan pengelola dana BOSDA. Pelatihan ini diikuti oleh sebagai bentuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar kapabilitas

dari profesionalismenya meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil perhitungan biaya dengan menggunakan analisis CVP pada SMP Negeri 4 Pakem memperoleh *break even point* sebesar 477 siswa dan Rp788.205.764, sedangkan pada SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta memperoleh *break even point* sebesar 348 siswa dan Rp9.708.375.551. Namun, berdasarkan hasil analisis data kualitatif penerimaan dana BOSDA dinilai berbeda oleh SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar

26 Yogyakarta dari sisi kecukupan dan kebutuhannya. Pada SMP Negeri 4 Pakem dana BOSDA yang diterima dinilai “belum” mencukupi untuk membiayai kebutuhan sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, sedangkan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta penerimaan dana BOSDA dinilai sebagai “pelengkap (membantu)” pembiayaan yang ada di sekolah dari sisi 8 standar nasional pendidikan maupun program dan kegiatan.

Selain itu, pada proses perhitungan biaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta terjadi berdasarkan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. (1) Tahap perencanaan, biaya yang akan dikeluarkan untuk satu tahun anggaran berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. (2) tahap pengelolaan, proses perhitungan biaya disesuaikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan dan kegiatan yang direncanakan. (3) tahap pelaporan, akhir dari proses perhitungan biaya untuk penggunaan dana BOSDA yang digunakan kemudian dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk lembar validasi pertanggungjawaban.

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah tidak mendapatkan dokumen penting, yakni laporan pertanggungjawaban dana komite dari SMP Negeri 4 Pakem sehingga hasil perhitungan yang dilakukan belum mencakup keseluruhan data yang ada. Namun, dengan tambahan dari wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 4 Pakem yang menekankan bahwa dana BOSDA di sekolah ini masih terasa kurang, hal ini membuat peneliti yakin terhadap justifikasi yang dilakukan bahwa penerimaan dana BOSDA di SMP Negeri 4 Pakem masih kurang. Selain itu, penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 4 Pakem dan SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta selaku penerima dana

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

BOSDA, tetapi tidak melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan sebagai pemberi dana BOSDA.

Implikasi dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini bisa memberikan tambahan literatur pada terkait dengan perhitungan biaya sekolah. Sedangkan dari sisi praktis, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran dan pemahaman kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah bahwa dengan adanya perhitungan yang cermat dan akurat, kepala sekolah dan bendahara bisa mengetahui tingkat pendapatan yang diterima harus berada pada taraf tertentu dan biaya yang harus dikeluarkan pada taraf tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu, bisa mewawancarai pihak komite sekolah yang terdiri atas beberapa wali murid agar mendapatkan sudut pandang yang lebih beragam dan bisa menambah beberapa sekolah dari masing-masing perwakilan kabupaten/kota, sehingga tidak hanya sekolah yang di berada di wilayah Kabupaten Sleman, namun dalam cakupan lebih besar seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Isi

- Abdullahi, S. R., Sulaimon, B. A., Mukhtar, I. S., & Musa, M. H. (2017). Cost-Volume-Profit Analysis as a Management Tool for Decision Making In Small Business Enterprise within Bayero University, Kano. *IOSR Journal of Business and Management*, 19(02), 40–45. <https://doi.org/10.9790/487x-1902014045>
- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 24–59. <https://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/27>
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jai.190187>

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/ja.kpp.v2i1.1521>
- Andi, M., AR, M., & Usman, N. (2015). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI KABUPATEN PIDIE*. 3(4), 53–63.
- Anhari, M., Nugroho, T. R., & Rubiyanto. (2020). *Penerapan Activity Based Costing (ABC) Untuk Menghitung Biaya Satuan (UNIT COST) Pendidikan Di SMK AL Hikmah Sumobito*.
- Anugrah, Mulawarman, W. G., & Nurlaelah. (2022). School Operational Assistance Management to Lighten School Burden : A Literature Review. *Journal of Education and Learning Innovation*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.eduline1235>
- Bastomi, M., Sudarmiatin, & Hermawan, A. (2021). Cost Volume Profit (CVP) Analysis As a Profit Planning Tool At Lay Cang MSMEs. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 03(02).
- Basuni, N. A. A., & Halim, A. (2023). Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(1), 1–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v11i2.83652>
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (1998). Resisting the “new public management”: Absorption and absorbing groups in schools and GP practices in the UK. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 11(4), 403–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513579810231439>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).
- DALCI, I. (2005). Activity-based cost-volume-profit analysis: another approach to break-even analysis. *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14, 227–244.
- Devi, Sihabudin, & Fauji, R. (2023). Analisis Break Even Point Dan Margin Of Safety Sebagai Alat Perencanaan Laba (Studi Pada B.O Coffee Shop Periode 2019-2021 Di Kab.Karawang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 2598–9944.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4853/http>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101>
- Gean, F., & Gean, V. (2015). *THE DESIRABILITY OF AN INTEGRATED LEARNING METHODOLOGY FOR ENRICHING CVP ANALYSIS*. 8(1), 2015.
- Hadiyanto, Famella, S., & Wiyono, B. B. (2019). The challenge of school operational assistance management in elementary schools. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(5), 421–432.
- Handayani, C. T., & Sukirno. (2016). Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 1, 1–12.
- Hassanah, A., & Daud, R. M. (2019). Analisis Cost Volume Profit Sebagai Alat Perencanaan Laba (Studi Kasus Pada Umkm Dendeng Sapi Di Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 190–214.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12232>
- Hayatunnida, J., & Shaleh. (2022). Analysis of Estimation of Education Unit Costs (Micro Approach and Macro Approach). *Journal of Educational Management Research*, 01.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods* (2E ed.).
- Kompas. (2023). *No Title*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/02/menelisis-biaya-seragam-sekolah-negeri-yang-tinggi>
- Johnson, G., & Kiani, R. (2010). *Case Study: Alex Charter School*. 6(4).
- LE, O. T. T., TRAN, P. T. T., TRAN, T. Van, & NGUYEN, C. Van. (2020). Application of Cost-Volume-Profit Analysis in Decision-Making by Public Universities in Vietnam. *Journal of Asian Finance*, 7(6), 277–286.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6>
- Lulaj, E., & Iseni, E. (2018). Role of Analysis CVP (Cost-Volume-Profit) as Important Indicator for Planning and Making Decisions in the Business Environment. *European Journal of Economics and Business Studies*, 4(August).
<https://doi.org/10.2478/ejes-2018-0043>
- Osahon, H., & Ph, O. (2014). *Financial Modeling in Non-Profit Organizations : The Cost-Volume-Profit Approach*. 5(6), 64–71.
- Phillips, P. A. (1994). Welsh Hotel : Cost-Volume- Profit Analysis and Uncertainty. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 6, 31–36.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09596119410059236>
- Prihatin, S., Pardanawati, S. L., & Kusuma, I. L. (2022). Factors Affecting the Timeliness of Distribution of School Operational Assistance Funds (Bos Program) At Smk Muhammadiyah Delanggu in 2020/2021 Academic Year. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1244–1249.
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6262>
- Purwanto, E., & Watini, S. S. (2020). Analisis

*Corresponding Author's email: harryfadholilakadjo@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Harga Pokok Produksi
Menggunakan Metode Full Costing
Dalam Penetapan Harga Jual
(STUDI KASUS UNIT
USAHA REGAR FRUIT). *Journal
of Applied Managerial Accounting*,
4(2), 248–253.
<https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2402>

Putra, F. D. (2017). Pengaruh Volume
Penjualan Dan Biaya Produksi
Kalung Terhadap Laba Pada
Hidayah Shop Kuta- Badung. *Jurnal
Pendidikan Ekonomi
Undiksha*, 9(2), 462.
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20127>

Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Adhitya Akhmadi^{*1}

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Intisari

Audit internal saat ini mengalami pergeseran peran dari yang semula berfokus pada pengendalian dan pelestarian nilai (*value preservation*) menjadi penciptaan nilai (*value creation*). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor internal pemerintah Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap program pemerintah yang bersifat strategis dan bertujuan untuk pemeratakan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih dikenal sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran BPKP dalam pelaksanaan PSN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi dalam pemenuhan peran BPKP tersebut. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep peran audit internal yang dikemukakan oleh Eulerich dan Lenz (2020) yang didasarkan pada model tiga lini (*three lines model*) dari The Institute of Internal Auditor (IIA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan reviu dokumen sebagai metode pengumpulan data. Data wawancara dan reviu dokumen dianalisis dengan menggunakan model analisis data Creswell.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPKP berperan sebagai partner tata kelola (*governance partner*) dan penasihat terpercaya (*trusted advisor*) dalam pengawasan PSN. Peran sebagai partner tata kelola dijalankan oleh BPKP dengan melaksanakan reviu tata kelola dan audit yang bersifat wajib (*mandatory*). Peran sebagai penasihat terpercaya diwujudkan dengan keterlibatan BPKP dalam kegiatan *debottlenecking* (pengurai hambatan) atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PSN. Di lain pihak, pengawasan yang dilakukan BPKP belum menjadi penggerak nilai (*value driver*) bagi manajemen PSN. Dukungan pemangku kepentingan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang berkontribusi terhadap pengawasan BPKP pada PSN.

Kata kunci: audit internal, peran audit internal, tata kelola, *trusted advisor*, Proyek Strategis Nasional, faktor pendukung pengawasan

PENDAHULUAN

Fungsi audit internal senantiasa berkembang dari masa ke masa. Audit internal yang pada mulanya hanya berupa aktivitas pengecekan hal-hal yang tidak biasa (*irregularities*) pada catatan akuntansi, saat ini telah berubah menjadi sebuah fungsi dalam organisasi yang dapat memberikan jaminan atas pencapaian tujuan organisasi (Moeller, 2016). Setiap perkembangan yang terjadi pada fungsi audit internal menunjukkan makin pentingnya peran audit internal dalam suatu organisasi. Penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat perubahan signifikan terhadap peran audit internal sejak diberlakukannya reformasi peraturan mengenai pengungkapan atas tata kelola perusahaan (Soh dan Martinov-Bennie, 2011).

Audit internal didefinisikan sebagai aktivitas penilaian yang dilaksanakan secara independen oleh suatu fungsi dalam organisasi atas aktivitas yang berlangsung dalam organisasi tersebut (Moeller, 2016). Aktivitas penilaian yang dilakukan oleh fungsi audit internal dimulai dari hal yang bersifat operasional, seperti penilaian atas pelaksanaan prosedur operasi standar organisasi, sampai

dengan yang bersifat strategis, seperti penilaian atas berbagai opsi pengembangan organisasi. Oleh karena penilaian tersebut dilaksanakan oleh fungsi yang ada di dalam organisasi, audit internal memerlukan suatu bentuk formal agar aktivitas yang dilakukannya dapat dilaksanakan secara independen dan kredibel.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan (*monitoring*), dan jenis-jenis pengawasan lainnya dilakukan BPKP untuk memberikan jaminan kepada kepala pemerintahan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satu wujud pelaksanaan tugas tersebut adalah pengawasan pada program pemerintah yang bersifat strategis (Perpres Nomor 192 Tahun 2014, Pasal 3). Program strategis didefinisikan sebagai program pemerintah yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera

direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat dalam skala yang luas (Perpres No. 3 Tahun 2016, Bab I, Pasal 1).

Peran auditor internal saat ini tidak hanya berfokus melakukan penilaian terhadap aktivitas operasional yang dilakukan oleh manajemen. Auditor internal saat ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis (*strategic partner*) dan penasihat terpercaya (*trusted advisor*) manajemen dalam merumuskan tata kelola organisasi yang baik demi pencapaian tujuan organisasi (IIA, 2020). Pergeseran peran auditor internal ini didorong oleh perkembangan lingkungan bisnis, teknologi, dan sosial yang menuntut suatu organisasi untuk senantiasa aktif dalam memanfaatkan peluang yang tersedia dan mengantisipasi tantangan yang dapat muncul di masa depan. BPKP selaku auditor internal Pemerintah Indonesia memiliki visi yang sejalan dengan hal tersebut. BPKP memiliki tujuan untuk menjadi auditor internal pemerintah yang dapat menjadi penasihat terpercaya bagi mitra kerjanya dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia (BPKP, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah menjabarkan pentingnya peran auditor internal terhadap tata kelola organisasi. Tawfik

dkk. (2023) menyatakan bahwa auditor internal berperan penting dalam memperkuat implementasi tata kelola pada organisasi. Auditor internal perlu melakukan berbagai jenis pengawasan, baik yang bersifat penjaminan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*), agar dapat memberikan nilai yang tambah yang diharapkan oleh organisasi (Rahayu dkk. 2020). Peran auditor internal sektor publik juga dirasa makin penting di tengah berbagai isu terkait korupsi dan inefisiensi pada organisasi pemerintahan (Rahayu dkk, 2020). Eulerich dan Lenz (2020) memperkenalkan konsep baru mengenai peran auditor internal dalam usahanya untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, yaitu sebagai partner manajemen di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal (*governance, risk, and control*), penasihat terpercaya (*trusted advisor*), dan sebagai penggerak nilai (*value driver*). Penelitian ini membahas peran BPKP selaku auditor internal pemerintah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional sebagai salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia sejak tahun 2016.

Penyelesaian Proyek Strategis Nasional telah memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan

jumlah masyarakat miskin, dan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sering menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terkait dengan sumber dan besaran pembiayaan, pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan, penyesuaian terhadap desain proyek, perizinan, serta pelaksanaan proyek itu sendiri (Kontan, 2022, Kompas, 2022). Selain itu, Proyek Strategis Nasional juga menimbulkan konflik pada masyarakat yang terdampak berupa konflik agraria dan isu pelanggaran HAM (Kompas, 2023). Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) dalam laporannya menyebutkan bahwa pengadaan tanah dan tata ruang menjadi isu utama dalam Proyek Strategis Nasional dengan persentase sebesar 29% (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2022). Setelah itu, isu terkait pendanaan dan pembiayaan menjadi permasalahan yang terbanyak kedua dengan 23%, diikuti dengan isu perizinan dan penyiapan serta konstruksi masing-masing dengan 21%.

Pengawasan terhadap tata kelola Proyek Strategis Nasional juga menjadi salah satu

tugas yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Kepala BPKP (Inpres No. 1 Tahun 2016, Diktum Kelima). Sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan intern, BPKP diharapkan dapat memberikan peringatan dini dan rekomendasi yang bersifat strategis agar pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi, berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu segera direspons dan ditemukan solusinya agar tidak menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian terkait pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi penting untuk diteliti lebih mendalam. Sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjadi mitra strategis dan penasihat terpercaya, patut dipelajari secara lebih mendalam mengenai strategi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dalam mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sehingga dapat membantu pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

pelaksanaan peran BPKP sebagai mitra strategis dan penasihat tepercaya pemerintah juga perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peran pengawasan yang dilakukan oleh BPKP pada Proyek Strategis Nasional dapat diketahui secara lebih luas serta menjadi referensi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia dalam melaksanakan pengawasan program strategis di masing-masing unit kerja APIP tersebut berada.

LANDASAN TEORI

Model tiga lini merupakan suatu model yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) untuk membantu organisasi dalam menyusun struktur dan proses terbaik demi pencapaian tujuan organisasi tersebut (IIA, 2020). Tidak hanya itu, model ini juga dapat memfasilitasi organisasi agar memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang memadai. Model ini menekankan terkait pentingnya arus informasi yang dapat diandalkan dari masing-masing pihak (organ pengurus, manajemen, dan auditor internal) kepada pemangku kepentingan. Keandalan informasi pada organisasi dapat dicapai apabila setiap struktur dalam organisasi saling bersinergi positif dalam menciptakan informasi tersebut

sehingga memberikan manfaat pada proses pengambilan keputusan.

Model tiga lini memiliki enam prinsip, yaitu (IIA, 2020), yaitu sebagai berikut.

- a. Tata kelola organisasi, terdiri atas akuntabilitas organ pengurus, pengelolaan risiko oleh manajemen, dan pemberian jaminan oleh fungsi audit internal,
- b. Peran organ pengurus,
- c. Peran manajemen serta lini pertama dan kedua,
- d. Peran lini ketiga,
- e. Independensi lini ketiga,
- f. Penciptaan dan perlindungan terhadap nilai.

Audit internal memiliki peran untuk memberikan jaminan dan saran yang didasarkan pada prinsip independen dan objektif kepada organ pengurus dan manajemen terkait upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Audit internal memiliki tanggung jawab untuk menyusun program kerja, merencanakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut, melaksanakan program kerja, dan kemudian melaporkannya kepada organ pengurus sebagai wujud akuntabilitas (IIA, 2020).

Sejalan dengan model tiga lini yang dikembangkan oleh IIA di atas, diperlukan suatu konsep baru bagi peran auditor dalam rangka penciptaan nilai bagi organisasi. Eulerich dan Lenz (2020) menjabarkan konsep baru peran auditor internal yang berorientasi pada penciptaan nilai dengan mengidentifikasi aktivitas audit yang dilakukan sebagai berikut.

a. Auditor Internal sebagai Partner Tata Kelola, Risiko, dan Pengendalian

Peran auditor internal dalam tahap ini berfokus pada perlindungan nilai yang dimiliki oleh organisasi. Auditor internal melakukan aktivitas pemberian jaminan (*assurance*) bahwa manajemen telah memiliki pengendalian yang diperlukan dan dilaksanakan secara memadai. Aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor internal sejalan dengan strategi yang ditetapkan oleh organisasi (Betti dan Sarens, 2018).

b. Auditor Internal sebagai Penasihat Tepercaya

Auditor internal pada tahap ini berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Usaha ini dilakukan oleh auditor internal dengan penggunaan pendekatan audit yang lebih

baik untuk memaksimalkan proses dan struktur yang telah ada. Auditor internal juga dapat memperbaiki proses dan struktur tersebut agar dapat berjalan secara lebih optimal. Auditor internal tidak hanya menyampaikan kesalahan yang dilakukan oleh manajemen, tetapi memberikan saran perbaikan.

c. Auditor Internal sebagai Penggerak Nilai

Auditor internal pada tahap ini perlu menyelaraskan aktivitasnya dengan strategi organisasi untuk menghasilkan nilai tambah (*added value*). Auditor internal juga mengetahui dan memahami harapan organ pengurus maupun manajemen atas peran auditor internal. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan auditor internal bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Strategi audit yang ditetapkan dapat berupa audit atas risiko strategis atau audit proses strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai topik utama yang

dieksplorasi secara mendalam (Creswell, 2014). Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi peran pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dalam Proyek Strategis Nasional di tengah tuntutan pergeseran peran auditor internal saat ini. Tuntutan kepada auditor internal untuk menjadi mitra strategis dan penasihat terpercaya manajemen memerlukan respons dari BPKP selaku auditor internal pemerintah Indonesia agar hasil pengawasan yang dilakukan senantiasa relevan dengan kebutuhan mitra kerjanya. Pemilihan Proyek Strategis Nasional menjadi topik utama dalam penelitian ini karena merupakan faktor kepentingan yang tinggi pada program ini dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber terpilih, sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dengan penelaahan dokumen, seperti arsip dan bentuk dokumen lainnya yang memuat informasi terkait topik penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Peneliti menggunakan metode

saturasi data untuk menjaga efektivitas waktu dan biaya penelitian.

Peneliti melakukan analisis data menggunakan model analisis Creswell (2014) yang terdiri atas enam tahapan berikut.

- a. Transkripsi wawancara
- b. Membaca keseluruhan data
- c. Mengembangkan kode
- d. Mendeskripsikan tema dan subtema menggunakan kode
- e. Menyajikan deskripsi tema dan subtema
- f. Membuat interpretasi hasil analisis

HASIL PENELITIAN

Peran BPKP dalam Pengawasan Proyek Strategis Nasional

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Proyek Strategis Nasional, BPKP menjalankan peran sebagai partner tata kelola dan penasihat terpercaya manajemen. Setiap peran yang dijalankan oleh BPKP tersebut akan dibahas secara lebih detail pada pembahasan di bawah ini.

Partner Tata Kelola

Partner tata kelola merupakan peran pertama yang perlu diberikan oleh auditor internal kepada pemangku kepentingan. BPKP menjalankan peran sebagai partner tata kelola dengan melaksanakan reviu tata kelola dan audit yang bersifat wajib terhadap Proyek

Strategis Nasional.

BPKP merespons amanat untuk melakukan pengawasan tata Kelola Proyek Strategis Nasional dengan menerbitkan Pedoman Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional. Tujuan penerbitan pedoman tersebut adalah agar pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh unit-unit kerja BPKP dapat berjalan secara efektif sehingga dapat menjadi salah satu dasar yang dimiliki oleh Kepala BPKP dalam memberikan rekomendasi strategis dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ada pun tujuan reviu tata kelola yang dilakukan BPKP atas Proyek Strategis Nasional adalah memperoleh gambaran mengenai kemajuan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta memperoleh informasi mengenai hambatan atau permasalahan yang terjadi pada proyek tersebut.

Pelaksanaan reviu tata kelola Proyek Strategis Nasional dilaksanakan BPKP setiap tiga bulan atau triwulanan. Pelaksanaan reviu tata kelola setiap tiga bulan tersebut didorong oleh motivasi untuk memperoleh gambaran kemajuan pekerjaan yang lebih cepat. Dengan pelaksanaan reviu yang lebih cepat, BPKP dapat segera mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi penyelesaian

masalah apabila progres proyek tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup reviu tata kelola yang dilakukan oleh BPKP dilakukan terhadap aspek-aspek tata kelola penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional terdiri atas 13 (tiga belas) aspek tata Kelola, meliputi:

- a. Penyiapan proyek;
- b. Penyediaan lahan untuk proyek;
- c. Rencana tata ruang wilayah lokasi proyek;
- d. Pembiayaan proyek;
- e. Jaminan pelaksanaan proyek dari pemerintah;
- f. Proses pemberian izin atau fasilitas lain dari instansi pemerintah terkait;
- g. Pengadaan barang/jasa;
- h. Penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- i. Kemajuan pembangunan fisik proyek;
- j. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek;
- k. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan proyek;
- l. Penciptaan lapangan pekerjaan, dan
- m. Pemanfaatan atas proyek-proyek yang telah dibangun.

BPKP tidak melakukan pengujian atas kebenaran data dan informasi mengenai

progres pembangunan fisik proyek, pertanggungjawaban keuangan, serta pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh manajemen proyek. Metode yang digunakan dalam kegiatan reviu meliputi tiga hal, yaitu reviu dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Ketiga metode tersebut digunakan untuk memperoleh keyakinan terbatas mengenai tata kelola Proyek Strategis Nasional dan informasi mengenai hambatan atau permasalahan yang terjadi serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut.

Setiap unit BPKP yang mendapatkan penugasan reviu selanjutnya membuat laporan hasil reviu yang kemudian hasilnya dikompilasi menjadi laporan kompilasi hasil reviu. Selain dilakukan kompilasi laporan secara nasional, BPKP juga melakukan konfirmasi kepada KPPIP atas permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap proyek Strategis Nasional. Konfirmasi tersebut untuk menggali pengetahuan dan tindak lanjut KPPIP terkait permasalahan tersebut. Laporan hasil reviu tata kelola Proyek Strategis Nasional terdiri atas tiga jenis laporan, yaitu laporan individual, laporan kompilasi, dan laporan atensi.

Laporan hasil reviu individual merupakan

laporan dalam bentuk surat yang disusun oleh unit kerja BPKP pelaksana reviu, baik di pusat maupun perwakilan, yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Proyek dan Direktorat Rendal (Perencanaan dan Pengendalian). Laporan hasil reviu individual memuat keterangan terkait dasar penugasan reviu, tujuan reviu, ruang lingkup reviu, metodologi reviu, hasil reviu yang menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada setiap aspek tata kelola pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan simpulan reviu.

Laporan kompilasi hasil reviu merupakan laporan berbentuk surat yang memuat kompilasi hasil reviu yang tercantum dalam laporan hasil reviu individual. Terdapat dua jenis laporan kompilasi, yaitu laporan kompilasi per kementerian/lembaga dan laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan kompilasi per kementerian/lembaga disusun oleh Direktorat di BPKP yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengelola Proyek Strategis Nasional. Laporan kompilasi per kementerian/lembaga ditujukan kepada menteri/kepala lembaga terkait. Laporan kompilasi per kementerian/lembaga memuat keterangan mengenai dasar pelaksanaan penugasan, tujuan, ruang lingkup, metodologi,

hasil reviu, dan simpulan.

Laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan laporan kompilasi hasil reviu yang bersumber dari laporan kompilasi per kementerian/lembaga. Laporan tersebut disusun oleh Direktorat di BPKP yang bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Sama halnya dengan laporan kompilasi per kementerian/lembaga, laporan kompilasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memuat keterangan mengenai dasar pelaksanaan penugasan, tujuan, ruang lingkup, metodologi, hasil reviu, dan simpulan.

Jenis laporan yang ketiga adalah laporan atensi. Laporan atensi merupakan laporan berbentuk surat yang disusun oleh Direktorat di BPKP yang bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Laporan atensi memuat informasi yang bersumber dari laporan individual, laporan kompilasi, dan informasi lainnya yang

relevan. Laporan atensi juga memuat rekomendasi strategis Kepala BPKP terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BPKP juga melakukan pengawasan lain seperti audit terhadap Proyek Strategis Nasional tertentu yang membutuhkan keahlian BPKP selaku auditor internal pemerintah. Jenis pengawasan lain tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, seperti kegiatan audit yang harus dilakukan BPKP sebelum pemerintah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas proyek-proyek tertentu. Di sisi lain, BPKP kurang memanfaatkan kewenangannya di hal-hal lain seperti pendampingan terhadap pengadaan barang/jasa tertentu dan pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan tertentu pada Proyek Strategis Nasional meskipun hal tersebut juga sudah disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016.

Penasihat Tepercaya

Penasihat tepercaya merupakan peran auditor berikutnya yang dapat dijalankan oleh fungsi auditor internal setelah memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan dan mengalami peningkatan tingkat kompetensi yang signifikan. Peran ini utamanya memberikan masukan-masukan kepada manajemen untuk perbaikan-perbaikan proses

bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. BPKP menjalankan peran sebagai penasihat terpercaya dengan melaksanakan *debottlenecking* dan koordinasi lintas sektor terhadap Proyek Strategis Nasional.

Hasil reviu tata Kelola Proyek Strategis Nasional menjadi salah satu dasar pertimbangan pimpinan BPKP dalam memberikan rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Rekomendasi tersebut selain disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, juga disampaikan secara langsung dalam rapat-rapat yang membahas mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet merupakan pemangku kepentingan utama atas hasil pengawasan BPKP terhadap Proyek Strategis Nasional. Kedua lembaga tersebut rutin melakukan diskusi dengan BPKP untuk membahas mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh BPKP pada saat melakukan kegiatan reviu dibahas bersama untuk ditemukan dan diputuskan alternatif

solusinya.

Reviu pada aspek pemanfaatan hasil pembangunan proyek memiliki tantangan tersendiri. Beberapa proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional tidak selalu menjelaskan secara detail terkait tujuan pembangunan proyek. Dampak yang diharapkan dari pembangunan proyek tersebut juga tidak diukur secara spesifik. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, BPKP juga menghadapi hambatan dalam melakukan reviu terhadap proyek-proyek yang didanai oleh swasta atau Penyertaan Modal Asing.

Pembahasan Peran Pengawasan BPKP terhadap Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan konsep peran auditor internal yang dikemukakan oleh Eulerich dan Lenz (2020, peneliti dapat menjabarkan peran BPKP selaku partner tata kelola dalam Proyek Strategis Nasional. BPKP melaksanakan penugasan berupa reviu terhadap 13 (tiga belas) aspek tata kelola Proyek Strategis Nasional. Penugasan reviu tersebut bertujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas mengenai perkembangan tata kelola pada proyek-proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. Hasil pengawasan BPKP kemudian dilaporkan kepada para pemangku

kepentingan untuk menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan atau keputusan penyelesaian terhadap suatu hambatan atau permasalahan. Meskipun demikian, peran BPKP hanya fokus pada tata kelola Proyek Strategis Nasional. BPKP tidak melakukan pengawasan terkait manajemen risiko dan pengendalian internal, baik di lingkup proyek maupun di lingkup program secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan reviu yang dilakukan oleh BPKP juga tidak dapat dijalankan pada seluruh proyek yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan konsep peran auditor internal yang dijabarkan oleh Eulerich dan Lenz (2020), peneliti dapat menjabarkan peran BPKP selaku penasihat tepercaya manajemen dalam pengawasan Proyek Strategis Nasional. BPKP dipercaya oleh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam rapat-rapat yang membahas mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional. Pemangku kepentingan memberikan kesempatan kepada BPKP untuk menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan. BPKP juga diharapkan untuk dapat memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Meskipun demikian,

pemberian saran dan rekomendasi oleh BPKP juga mengalami beberapa tantangan. Tantangan tersebut berupa kurang lengkapnya informasi yang diberikan oleh mitra pengawasan serta bervariasinya tingkat kompetensi dan pengalaman sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan reviu.

Berdasarkan konsep peran auditor internal yang dijabarkan oleh Eulerich dan Lenz (2020), peneliti tidak dapat menjabarkan peran BPKP selaku penggerak nilai manajemen dalam pengawasan Proyek Strategis Nasional. Hal ini disebabkan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPKP didasarkan pada peraturan yang memberikan batasan mengenai jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan pada Proyek Strategis Nasional. Bahkan pelaksanaan jenis pengawasan yang diawali dengan permintaan pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kelima Inpres 1 Tahun 2016 juga relatif terbatas. BPKP juga tidak proaktif untuk memanfaatkan seluruh kewenangannya agar dapat memberikan nilai tambah maksimal pada hasil pengawasannya. Sementara itu, peran audit internal sebagai penggerak nilai organisasi membutuhkan kolaborasi yang

intensif antara fungsi audit internal dengan mitra pengawasannya, yang mana mitra pengawasan membutuhkan hasil pengawasan dari audit internal serta dapat menggunakannya untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih baik.

Faktor yang Berkontribusi terhadap Pengawasan BPKP pada Proyek Strategis Nasional

Pemerintah menerbitkan serangkaian regulasi sebagai bentuk dukungan kepada BPKP agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap Proyek Strategis Nasional. Dukungan pemangku kepentingan juga hadir pada saat BPKP melaksanakan pengawasan tata kelola Proyek Strategis Nasional. Mitra pengawasan bersedia untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan BPKP agar hasil pengawasan yang dilakukan memperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi dan dapat menjadi dasar pertimbangan pimpinan BPKP untuk memberikan rekomendasi dan usulan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Bentuk lain dukungan pemangku kepentingan terhadap pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap Proyek Strategis Nasional adalah

pemberian kesempatan kepada BPKP untuk menyampaikan hasil pengawasannya pada forum-forum resmi untuk membahas perkembangan atau permasalahan yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional.

Sumber daya manusia yang dimiliki BPKP dapat menunjang tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengawasan tata kelola Proyek Strategis Nasional. Sumber daya manusia BPKP yang besar tersebar di perwakilan BPKP yang berada seluruh provinsi di Indonesia. Sumber daya manusia BPKP, khususnya auditor juga memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai auditor intern pemerintah. BPKP juga membangun komunikasi yang komprehensif dengan para pemangku kepentingan di daerah sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

SIMPULAN

BPKP melaksanakan penugasan berupa reviu terhadap 13 (tiga belas) aspek tata kelola Proyek Strategis Nasional. Penugasan reviu tersebut bertujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas mengenai perkembangan tata kelola pada proyek-proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. Selain itu,

revisi juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang terjadi serta upaya untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut. Hasil pengawasan BPKP kemudian dilaporkan kepada para pemangku kepentingan untuk menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan atau keputusan penyelesaian terhadap suatu hambatan atau permasalahan. Selain itu, BPKP juga melaksanakan jenis pengawasan lain terhadap Proyek Strategis Nasional, khususnya apabila pengawasan tersebut telah menjadi amanat peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, peran BPKP selaku partner tata kelola manajemen dapat diperluas pada tahap penentuan proyek-proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Keahlian dan pengalaman BPKP di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal dapat menjadi wawasan dan pertimbangan yang penting bagi manajemen KPPIP dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meminimalisasi risiko dan dampak negatif yang timbul dari pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

BPKP dipercaya oleh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam rapat-rapat yang membahas mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional. Pemangku

kepentingan memberikan kesempatan kepada BPKP untuk menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan. BPKP juga diharapkan untuk dapat memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. BPKP memiliki data dan informasi yang komprehensif karena data dan informasi tersebut bersumber dari hasil pengawasan yang dilakukan pada setiap proyek yang ada dalam daftar Proyek Strategis Nasional. BPKP juga memberikan wawasan (*insight*) tambahan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk pengawasan terhadap aspek pemanfaatan proyek.

Pemerintah memberikan dukungan berupa penetapan serangkaian regulasi yang memperkuat legitimasi BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terhadap pengawasan Proyek Strategis Nasional. Sementara itu, pihak manajemen juga mengapresiasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan melibatkan BPKP dalam penentuan kebijakan-kebijakan penting untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mitra pengawasan BPKP, dalam hal ini manajemen proyek, juga memberikan dukungan berupa penyediaan

akses data dan informasi yang dibutuhkan BPKP agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif. Di lain pihak, BPKP juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kehadiran BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap Proyek Strategis Nasional dapat diterima dengan baik oleh seluruh mitra pengawasan.

Sumber daya manusia yang dimiliki BPKP dapat menunjang tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengawasan tata kelola Proyek Strategis Nasional. Sumber daya manusia BPKP yang besar tersebar di perwakilan BPKP yang berada seluruh provinsi di Indonesia. Sumber daya manusia BPKP, khususnya auditor, juga memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai auditor intern pemerintah. BPKP juga membangun komunikasi yang komprehensif dengan para pemangku kepentingan di daerah sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Alqudah, Hamza, Noor Afza Amran, Haslinda Hassan, Abdalwati Lutfi, Noha Alessa, Mahmaod Alrawad, dan Mohammed Amin Almaiah. 2023. "Examining the Critical

Factors of Internal Audit Effectiveness from Internal Auditors' Perspective: Moderating Role of Extrinsic Rewards." Volume 9, Issue 10. Heliyon. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20497>

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2021. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Banleon, Ulrich, Anne d'Arcy, Marc Eulerich, Anja Hucke, Burkhard Pedell, dan Nicole V.S. Ratzinger-Sakel. 2020. "Coordination Challenges in Implementing The Three Lines of Defense Model". Internasional Journal of Auditing. John Wiley & Sons Ltd.

Betty, Nathanael dan Gerrit Sarens. 2018. "Aligning Internal Audit Activities and Scope to Organizational Strategy: How the Business Environment and Organizational Strategy Impact Internal Audit". Internal Audit Foundation. 3-27.

Borg, Glen., Peter J. Baldacchino, Sandra Buttigieg, Engin

Boztepe, dan Simon Grima. 2020. "Challenging the Adequacy of the Conventional 'Three Lines of Defence' Model: A Case Study on Maltese Credit

- Institutions.*" Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 102). Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 303-324.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. "Pedoman Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional." Kepala BPKP.
- Cresswell, John W. 2014. "Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approach." 4th Edition. California: SAGE Publishing.
- Deloitte. 2020. "A Call to Action on the Three Lines Model."
- Dzikrullah, Achmad Dzulfikar, Iman Harymawan, Melinda Cahyaning Ratri, dan Collins G. Ntim. 2020. "Internal audit functions and audit outcomes: Evidence from Indonesia." Cogent Business & Management, 7(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1750331>
- Eulerich, Mark dan Rainer Lenz. 2020. "Defining, Measuring, and Communicating the Value of Internal Audit." Lake Mary, Florida: Internal Audit Foundation.
- Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2020. "Qualitative Research Method." SAGE Publications Limited. Thousand Oaks. Adobe PDF Ebook.
- Husaini. 2017. "Evaluasi Pengembangan Indikator Kinerja Studi pada Badan Pusat Statistik." Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- IIA. 2020. "Model Tiga Lini: Pembaharuan dari Model Pertahanan Tiga Lini." IIA.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden Republik Indonesia. 8 Januari.
- Komite Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. 2022. Laporan KPPIP Semester II. Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
- Laksono, Muhdany Yusuf (2022). "KPPIP Berberkan Sederet Problem dalam Pembangunan Infrastruktur PSN." Dalam *kompas.com*, 28 Juli 2022, diakses pada 6 November 2022.
- Lubis, Henny Zurika dkk. 2024. "Effect of Internal Audit, Internal Control, and Audit Quality on Fraud Prevention: Evidence from the Public Sector in Indonesia." Volume 22 2024, Issue #2, pp. 44-50. Problems and Perspectives in Management.

- [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Mimin, Dwi Hartono (2023). "Konflik Pulau Rempang dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional." Dalam *kompas.com*, 25 September 2023, diakses pada 7 November 2023.
- Moeller, Robert R. 2016. "*Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*." Edisi Kedelapan. New Jersey: John Wiley & Sons Inc., Hoboken. Adobe PDF Ebook.
- Nasal, Tandid dan Lindawati Gani. 2022. "*Evaluation of Internal Audit Role as a Governance, Risk and Compliance Partner, Trusted Advisor and Value Driver to Implement Strategy (Case Study of Indonesia's Social Health Insurance Provider)*". JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 7 (2), 346-362. DOI 10.23887/jia.v7i2.47931.
- Nederifar, Goli, dan Ghaljaie. 2017. "Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Method." *Strides in Development of Medical Education*. September; 14 (3):e67670. DOI 10.5812/sdme.67670.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden Republik Indonesia. 8 Januari.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan. Presiden Republik Indonesia. 31 Desember.
- Rahayu, Sri, Yudi, dan Rahayu. 2020. *Internal Auditors Indicators and Their Support of Good Governance*. *Congent Bussiness & Management* 7:175.1020. Diakses pada 1 November 2023. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1751020>.
- Setianto, Hari. 2020. "Menyongsong Revisi Model *Three Lines of Defense*: Bagi-bagi Tugas *Governance Measures*." Diakses pada 24 April 2024. <https://iia-indonesia.org/news-hs-31-may-20a/>
- Siregar, Ayu Febriani Juwita. 2016. "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau." Tesis Gelar Master. Universitas Gadjah Mada.
- Soh, D.S.B. dan Martinov-Bennie, N. (2011), "*The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluation*", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26 No. 7, pp. 605-622. Diakses pada

Pengaruh Uang Saku, Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa STIE Surakarta)

Febryana Vinky Hernanda*¹ Era Trianita Saputra²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh uang saku, literasi keuangan, dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa di STIE Surakarta. Populasi menggunakan mahasiswa aktif jurusan akuntansi dan manajemen di STIE Surakarta yang terdaftar pada situs PDDikti. Penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dan teknik *purposive sampling* menghasilkan 63 responden yang memenuhi kriteria. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan uji T untuk masing masing variabel dan uji F untuk uji bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang saku dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, sementara perilaku keuangan tidak memberikan dampak yang signifikan. Secara simultan uang saku, literasi keuangan, dan perilaku keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa.

Kata kunci : Uang Saku, Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Keputusan Investasi, Kuantitatif

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman yang kian modern dan semakin kompleksnya produk-produk keuangan, sangat penting bagi setiap individu untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Di era globalisasi yang mengalami perkembangan pesat ini, setiap orang dituntut untuk memiliki pengetahuan serta wawasan yang memadai tentang dunia keuangan, serta memahami cara mengelola sumber daya keuangannya secara efektif (Gunawan *et al.*, 2021).

Saat ini, topik investasi semakin menarik perhatian berbagai kalangan, terutama di kalangan mahasiswa. Investasi dapat diartikan sebagai proses menanamkan modal atau uang untuk menciptakan kekayaan yang mampu menghasilkan keuntungan, baik di masa depan maupun saat ini (Gustika dan Yaspita, 2021). Individu memiliki beragam pilihan investasi yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai tujuan ini. Sebagai contoh, Diva dan Suardana (2023) mengemukakan bahwa seseorang bisa berinvestasi melalui berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, dan lain-lain.

Keputusan yang tepat diperlukan untuk setiap investasi karena keputusan ini akan mempengaruhi hasil investasi di masa

depan dan mengandung ketidakpastian. Proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi adalah langkah penting untuk menyelesaikan masalah dan memilih pilihan investasi yang paling sesuai (W. W. Putri dan Hamidi, 2019).

Tingkat literasi keuangan siswa dan mahasiswa sebesar 47,56%, di bawah rata-rata nasional 49,68%. Bahkan mahasiswa terlibat dalam kasus pidana karena kurangnya pengetahuan keuangan mereka. Beberapa siswa berasal dari daerah jauh di luar kota, sehingga mereka harus mandiri dan bertanggung jawab penuh atas pengeluaran mereka sendiri (Kompas, 2023).

Uang saku adalah pendapatan yang diterima mahasiswa dari orang tua, dan hal ini dapat memengaruhi perilaku konsumsi mereka (Mardiyana dan Ani, 2019). Semua materi yang diberikan orang tua kepada anaknya menjadi sebuah kewajiban bagi mahasiswa untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan dan harapan orang tua.

Mahasiswa adalah individu sosial yang saling mempengaruhi dan berinteraksi, yang dapat menghasilkan dampak baik maupun buruk. Salah satu dampak negatif yang dihadapi mahasiswa adalah

konsumerisme, yaitu kecenderungan untuk mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan (Melinda *et al.*, 2022).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan investasi adalah perilaku keuangan. Siregar dan Anggraeni (2022) menjelaskan bahwa perilaku keuangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu berinvestasi dan berinteraksi dengan aspek-aspek keuangan. Menerapkan perilaku keuangan yang positif adalah langkah awal menuju pengelolaan keuangan yang efektif. Tanpa memiliki perilaku yang baik dalam mengelola keuangan, akan sangat sulit untuk mencapai surplus yang diperlukan untuk tabungan atau investasi di masa depan.

Sering kali orang memilih investasi yang tidak menguntungkan karena kebutuhan finansial sekarang. Perilaku keuangan yang tidak sehat, seperti menghabiskan uang saku untuk konsumsi, juga mempengaruhi keputusan investasi karena kebanyakan orang lebih memilih membeli sesuatu yang sifatnya hanya konsumtif. Menurut Dilasari (2020) Perilaku konsumtif seringkali muncul dalam diri mahasiswa, dengan ketertarikan yang kuat terhadap produk-produk yang dipasarkan.

Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal mencapai 12,16 juta pada Desember 2023



Gambar 1. Grafik Jumlah Investor Pasar Modal

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,17% dibandingkan bulan sebelumnya (*month-on-month/mtm*). Pada Desember 2023, jumlah investor pasar modal di Indonesia meningkat 18,01% dibandingkan Desember 2022 (*year-on-year/yoy*). Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal Indonesia terus mengalami pertumbuhan selama dua tahun terakhir. Sehingga Desember 2023, hanya 0,34% dari investor adalah institusi, dan 99,66% dari investor adalah individu (databoks).

Saat ini, investasi telah menjadi tren di kalangan anak muda, pelajar, dan mahasiswa. Dengan modal awal sebesar Rp 100 ribu, mereka sudah dapat membeli saham. Di wilayah Solo Raya, jumlah investor di pasar modal telah mencapai 110.

884 orang. Menariknya, sebanyak 70.968 orang atau sekitar 64 persen dari total tersebut adalah investor muda berusia hingga 30 tahun, dan mereka mengakses informasi melalui situs web (Tribunnews.com, Solo 2022).

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan kepada 30 mahasiswa STIE Surakarta, mereka melakukan kegiatan menabung di berbagai pos antara lain investasi, bank, emas, dan dana darurat. Dari 30 mahasiswa tersebut 50% diantaranya memilih menabung di investasi juga dalam berbagai produk salah satunya pada saham. Mereka mengeluarkan modal paling sedikit sebesar Rp 50.000 untuk membeli saham.

Namun mahasiswa STIE Surakarta masih memiliki kebiasaan yang buruk dalam mengontrol dan mengelola keuangannya contohnya masih mementingkan pengeluaran konsumtif walaupun sebagian masih ada yang bisa menyisihkan uangnya untuk diinvestasikan. Maka dari itu perlunya kesadaran dalam mengelola keuangannya dengan baik, contohnya mengelola keuangannya untuk kebutuhan hidup dan diinvestasikan. (peneliti, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ayudiasuti (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Keputusan

Investasi”, Mandagie *et al.*, (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi” memberikan hasil bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Sedangkan hasil penelitian oleh Yundari & Artati, (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi”, menunjukkan hasil penelitian pada variabel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Uang Saku, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus pada Mahasiswa STIE Surakarta)”.

2. TEORI

Theory Of Planned Behaviour:

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behaviour*. Teori ini mengemukakan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh niat mereka, serta bagaimana sikap dan norma subjektif dapat

memengaruhi niatan tersebut. Menurut teori ini, individu cenderung membuat keputusan secara rasional, dengan memanfaatkan informasi dan pengalaman yang mereka miliki untuk menentukan pilihan perilaku. Dalam konteks keputusan investasi, *Theory Of Planned Behaviour* menekankan pentingnya merancang keputusan yang berdasarkan perhitungan rasional, serta mempertimbangkan fakta dan pengetahuan yang tersedia (Susanti dan Tipa, 2024).

Berdasarkan *Theory of planned behavior* perilaku investasi mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk uang saku, literasi keuangan dan perilaku keuangan. Uang saku sebagai sumber pendapatan utama bagi mahasiswa mempengaruhi kontrol perilaku mereka karena ketersediaan atau keterbatasan dana dapat menentukan sejauh mana mereka merasa mampu untuk berinvestasi. Literasi keuangan berperan dalam membentuk sikap terhadap investasi, dimana pemahaman yang baik tentang konsep keuangan meningkatkan keyakinan mahasiswa terhadap potensi keuntungan dari investasi sehingga mereka lebih cenderung mengambil keputusan investasi yang rasional. Selain itu, perilaku keuangan mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola dan merencanakan

keuangan mereka dapat mempengaruhi norma subjektif dan sikap mereka terhadap investasi.

Uang Saku

Uang saku adalah dana yang dibawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, uang saku juga mencerminkan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Pada anak kuliah di perantauan, orang tua memberikan uang untuk digunakan untuk biaya transportasi, makan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses perkuliahan. Uang saku diberikan setiap hari, mingguan, atau bulanan untuk keperluan sehari-hari (Halik *et al.*, 2023).

Literasi Keuangan

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), literasi keuangan adalah istilah yang mencakup beragam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengambil berbagai keputusan demi mencapai kesejahteraan finansial individu. Kepribadian, kemampuan berhitung, dan preferensi seseorang dapat berdampak pada pengetahuan dan keterampilan mereka tentang keuangan, serta motivasi mereka untuk membuat keputusan tersebut (Mandagie *et al.*, 2020).

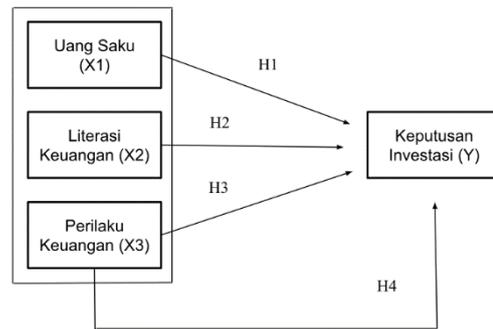
Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola uangnya sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, peninjauan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penghematan. Keinginan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya sejalan dengan jumlah uang yang diterima juga menjadi bagian penting dari perilaku ini (W. D. Putri *et al.*, 2023).

Keputusan Investasi

Menurut Fridana dan Asandimitra (2020), keputusan investasi merupakan langkah untuk mengalokasikan dana atau menanamkan modal dalam bentuk investasi, dengan tujuan untuk meraih keuntungan di masa akan datang dari satu atau beberapa aset. Dalam hal ini, keputusan investasi melibatkan pemilihan antara dua atau lebih opsi investasi, dengan harapan dapat mewujudkan keuntungan di masa depan.

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Uang Saku terhadap Keputusan Investasi

Jumlah uang saku yang dapat diterima siswa sangat bergantung pada pendapatan orang tua dan sejumlah tabungan yang dimiliki. Tabungan ini, pada gilirannya, memengaruhi minat mereka untuk berinvestasi di pasar modal. Sejalan dengan *Theory Of Planned Behaviour*, uang saku yang lebih besar berpotensi memengaruhi perilaku mahasiswa. Hal ini didukung oleh temuan sebelumnya dari penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi *et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa jumlah uang saku memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi yang diambil siswa.

H1 : Uang Saku berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa STIE Surakarta

2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi

Literasi keuangan adalah suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, yang membahas pengaruh pengetahuan terhadap perilaku seseorang, individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan diharapkan mampu membuat keputusan investasi yang tepat guna mencapai keuntungan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mandagie *et al* (2020).

H2 : Literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa STIE Surakarta

3. Pengaruh Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi

Perilaku keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika individu tidak menunjukkan sikap yang bijak dan disiplin dalam pengelolaan keuangannya, pemasukan yang mereka terima cenderung habis digunakan untuk pengeluaran yang bersifat konsumtif. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour*, yang menjelaskan bagaimana perilaku

seseorang mempengaruhi keputusan yang diambil. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Siregar dan Anggraeni (2022), ditemukan bahwa perilaku keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi.

H3 : Perilaku keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa STIE Surakarta.

4. Pengaruh Uang Saku, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi

Uang saku, literasi keuangan, dan perilaku keuangan memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pengambilan keputusan investasi. Sejalan dengan *Theory Of Planned Behaviour*, jumlah uang saku yang diterima, tingkat literasi keuangan yang memadai, serta kebijaksanaan dalam mengelola aspek keuangan akan memberikan kepercayaan lebih bagi individu untuk membuat keputusan investasi. Penelitian sebelumnya oleh Siregar dan Anggraeni (2022) serta Surahman *et al.* (2023) menunjukkan bahwa ketiga faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi yang diambil.

H4 : Pengaruh Uang Saku, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan Investasi

3. METODE PENELITIAN

JENIS DAN SUMBER DATA

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sugiyono (2020:16) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini bertujuan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data melalui alat penelitian yang telah ditetapkan, serta menguji hipotesis yang diajukan. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau statistik yang dianalisis secara sistematis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang menjadi fokus penelitian adalah mahasiswa aktif dari jurusan Akuntansi dan Manajemen di STIE Surakarta yang terdaftar di situs PDDikti pada tahun ajaran 2023, sejumlah 2.409 mahasiswa. Mengingat jumlah populasi yang melebihi 100 orang, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin (Sugiyono, 2020). Berikut perhitungan sampel menggunakan rumus slovin :

$$\begin{aligned}
 n &= N / (1 + (N \times e^2)) \\
 &= 2.409 / (1 + (2.409 \times 0,1^2)) \\
 &= 2.409 / (1 + (2.409 \times 0,01)) \\
 &= 2.409 / (1 + (24,09)) \\
 &= 2.409 / 25,09
 \end{aligned}$$

$$= 96,0143 \text{ dibulatkan } 100$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, diperoleh sampel sebanyak 100 responden dengan batas toleransi sebesar 10%. Dari jumlah tersebut, peneliti menerapkan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif STIE Surakarta, dari jurusan akuntansi dan manajemen, serta memiliki uang saku di atas Rp. 250.000. Dengan kriteria tersebut, terpilih sebanyak 63 responden.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2020), kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban mereka. Kuesioner ini mencakup berbagai pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan uang saku, literasi keuangan, perilaku keuangan, dan keputusan investasi. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut, digunakan skala *Likert*.

Tabel 2. Skala Likert

<u>Deskripsi</u>	<u>Bobot</u>
Sangat <u>Setuju</u>	5
Setuju	4
<u>Netral</u>	3
<u>Tidak Setuju</u>	2
Sangat <u>Tidak Setuju</u>	1

Sumber: Susanti & Tipa (2024)

TEKNIK ANALISIS DATA

Berikut ini teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1) Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019), uji validitas bertujuan untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan sah atau tidak, dengan cara menganalisis kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sebuah data dapat dikatakan valid jika instrumen yang digunakan mampu mengukur hal yang seharusnya diukur.

Untuk menilai validitas data, salah satu kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka item pernyataan tersebut dianggap signifikan atau valid. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item tersebut tidak memenuhi syarat validitas.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019), sebuah instrumen dikategorikan reliabel apabila koefisien reliabilitasnya minimal mencapai 0,6. Jika nilai koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari 0,6, maka instrumen penelitian tersebut dapat dianggap reliabel. Sebaliknya, jika nilai koefisien reliabilitasnya $< 0,6$

maka instrumen penelitian dapat dikatakan tidak reliabel.

3) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan dalam data yang diteliti, berdasarkan analisis distribusi, korelasi, dan varians dari indikator-indikator pada variabel. Melalui uji ini, kita dapat memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah sah dan valid. Selain itu, data teoritis yang digunakan diharapkan tidak memiliki bias dan stabil, sehingga penaksiran koefisien regresi yang dihasilkan juga efisien (Sugiyono, 2019).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal, seperti yang dijelaskan oleh Ghazali (2021:196). Sebuah model regresi yang baik seharusnya memiliki variabel residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji One Kolmogorov-Smirnov serta pendekatan Monte Carlo.

Hasil dari uji normalitas ini didasarkan pada dua kemungkinan. Jika nilai Signifikansi (2-tailed) lebih

besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti variabel residual berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2021:157), bertujuan untuk menentukan apakah suatu model regresi yang baik memiliki korelasi yang tidak signifikan antara variabel independen. Dalam mengambil keputusan mengenai adanya multikolinearitas, jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga berada dalam batas yang wajar, maka dapat dianggap tidak ada masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas, sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2021:178), bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan dalam variasi residual antar pengamatan dalam model regresi. Apabila variasi residual antara pengamatan

konsisten, maka kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan, maka istilah yang digunakan adalah heteroskedastisitas. Adanya gaya heteroskedastisitas atau homoskedastisitas tidak seharusnya terjadi dalam model regresi yang baik.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan tes Spearman. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai Sig. (*2-tailed*) berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

4) Analisis Linear Berganda

Uji heteroskedastisitas, sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali (2021:178), merupakan salah satu langkah penting dalam analisis regresi linear berganda. Ghozali (2021:8) menyatakan bahwa analisis ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menginvestigasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial, yang sering disebut sebagai uji t, merupakan metode yang digunakan untuk

menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Mandagie et al., 2020). Dalam artikel Statistika berjudul "Uji F dan Uji T", salah satu cara untuk melaksanakan uji ini adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, atau dengan memperhatikan kolom signifikansi yang terkait dengan setiap t hitung. Proses uji t sangat mirip dengan uji F, sebagaimana terlihat dalam perhitungan SPSS pada Full Model Coefficient Regression/Enter.

Kriteria dalam uji t adalah jika nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dari Uji F, seperti yang dijelaskan oleh Ghazali (2021:148), adalah untuk menilai sejauh mana model regresi dapat digunakan untuk mengamati pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji ini adalah 0,5 yang menunjukkan bahwa jika nilai signifikan F maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara

simultan mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya.

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2021), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model (variabel independen) dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang antara nol hingga satu. Semakin mendekati satu nilai tersebut, semakin besar kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menyajikan sebagian informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi tersebut.

3. HASIL PENELITIAN

Tabel 4. *Output* Uji Validitas Data

No	Variabel	Item Pernyataan	Validitas		
			R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
1	Uang Saku (X1)	X1.1	0,626	0,248	Valid
		X1.2	0,665	0,248	Valid
		X1.3	0,679	0,248	Valid
		X1.4	0,824	0,248	Valid
2	Literasi Keuangan (X2)	X2.1	0,606	0,248	Valid
		X2.2	0,625	0,248	Valid
		X2.4	0,750	0,248	Valid
		X2.5	0,557	0,248	Valid
		X2.6	0,605	0,248	Valid
3	Perilaku Keuangan (X3)	X3.1	0,810	0,248	Valid
		X3.2	0,738	0,248	Valid
		X3.3	0,696	0,248	Valid
		X3.4	0,722	0,248	Valid
		X3.5	0,398	0,248	Valid
4	Keputusan Investasi (Y)	Y.1	0,634	0,248	Valid
		Y.2	0,707	0,248	Valid
		Y.3	0,740	0,248	Valid
		Y.4	0,680	0,248	Valid
		Y.5	0,737	0,248	Valid

Sumber : Output olah data primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner yang telah disusun terbukti *valid*. Validitas ini dapat dibuktikan dengan menggunakan nilai r tabel, yang diperoleh melalui rumus $df = n - 2$, yaitu $63 - 2 = 61$, dengan taraf uji signifikansi satu arah pada tingkat 0,05 yang bernilai 0,248. Semua pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari 0,248. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan tersebut valid karena telah melebihi ambang batas validitas yang telah ditentukan.

Tabel 5. Output Uji Reliabilitas Data

Variabel	Item Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat Reliabel	Keterangan
Uang Saku (X1)	4	0,653	0,60	Reliabel
Literasi Keuangan (X2)	5	0,609	0,60	Reliabel
Perilaku Keuangan (X3)	5	0,709	0,60	Reliabel
Keputusan Investasi (Y)	5	0,732	0,60	Reliabel

Sumber: Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel uang saku, literasi keuangan, dan perilaku keuangan memiliki tingkat reliabilitas yang melebihi batas minimum yaitu 0,06. Dengan demikian, seluruh item pernyataan tersebut dapat dianggap reliabel.

Tabel 6. Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,86047322
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,094
	Negative	-,046
Test Statistic		0,94
Asymp. Sig. (2-Tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* menunjukkan angka 0,200. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut berdistribusi normal, karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05.

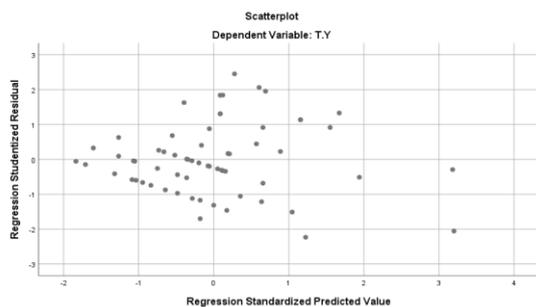
Tabel 7. Output Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Uang_Saku (X1)	0,525	1,903
	Literasi_Keuangan (X2)	0,495	2,020
	Perilaku_Keuangan (X3)	0,872	1,148

a. Dependent Variable: Keputusan_Investasi

Sumber: Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa untuk variabel X1, nilai toleransi yang diperoleh adalah 0,525, dengan nilai VIF sebesar 1,903. Sementara itu, variabel X2 menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,495 dan VIF sebesar 2,020. Adapun untuk variabel X3, nilai toleransinya mencapai 0,872 dengan VIF 1,148. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen.



Gambar 3 Output Heterokedastisitas

Sumber : Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan gambar 3 di atas, terlihat bahwa penyebaran titik-titik tidak terfokus pada satu area tertentu dan cenderung menyempit tanpa membentuk pola yang jelas. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Output Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficient	Sig.
		B	
1	(Constant)	5,823	,000
	Uang_Saku	,296	,000
	Literasi_Keuangan	,408	,000
	Perilaku_Keuangan	-,022	,450

a. Dependent Variable: Keputusan_Investasi

Sumber : Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat disusun dalam persamaan berikut ini :

$$y = 5,823 + 0,296x_1 + 0,408x_2 - 0,022x_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang menghasilkan angka 5,823 menunjukkan bahwa jika variabel uang saku (X1), literasi keuangan (X2), dan perilaku keuangan (X3) memiliki nilai 0, maka variabel keputusan investasi (Y) akan terkonfirmasi dengan angka 5,823.
2. Koefisien untuk variabel uang saku sebesar 0,296 dan bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan uang saku akan berdampak pada peningkatan keputusan investasi mahasiswa.
3. Demikian pula, koefisien untuk variabel literasi keuangan sebesar 0,408 juga bernilai positif, yang berarti jika literasi keuangan

- meningkat, keputusan investasi mahasiswa pun cenderung akan meningkat.
- Sebaliknya, koefisien untuk variabel perilaku keuangan yang sebesar 0,022 dan bernilai negatif mengindikasikan bahwa jika perilaku keuangan meningkat, keputusan investasi mahasiswa akan mengalami penurunan, dan sebaliknya.
 - Dengan mengacu pada tabel 8 di atas, perbandingan nilai regresi menunjukkan bahwa uang saku (X1) sebesar 0,296, literasi keuangan (X2) sebesar 0,408, dan perilaku keuangan (X3) sebesar 0,022, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan (X2) memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan investasi mahasiswa.

Tabel 9. *Output Uji T*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,823	,736		7,911	,000
	Uang_Saku	,296	,056	,383	5,299	,000
	Literasi_Keuangan	,408	,049	,623	8,352	,000
	Perilaku_Keuangan	,022	0,29	,043	0,760	,450

a. Dependent Variable: Keputusan_Investasi

Sumber: Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Uang saku menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,299 lebih besar dari t tabel yaitu 1,671, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Dari pernyataan tersebut dapat

- disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya uang saku berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa.
- Literasi keuangan menghasilkan nilai t hitung sebesar 8,352 lebih besar dari t tabel yaitu 1,671 dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima yang artinya literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa.
 - Perilaku keuangan menghasilkan t hitung sebesar 0,760, yang lebih besar dari t tabel yaitu $< 1,671$ dengan nilai sig sebesar $0,450 > 0,05$. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak yang artinya perilaku keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa.

Tabel 10. *Output Uji F*

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	100,951	3	33,650	101,435	,000 ^b
	Residual	19,573	59	,332		
	Total	120,524	62			

a. Dependent Variable: Keputusan_Investasi
b. Predictors: (Constant), Uang_Saku, Literasi_Keuangan, Perilaku_Keuangan

Sumber: Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 10 di atas, terlihat bahwa keputusan investasi yang diambil oleh mahasiswa menghasilkan nilai F hitung sebesar 101,435, yang lebih besar dari F tabel yang hanya 2,761. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,00 < 0,05$. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4

diterima yang berarti uang saku, literasi keuangan, dan perilaku keuangan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa.

Tabel 11. *Output* Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 ^a	,838	,828	,57597
a. Predictors: (Constant), Uang_Saku, Literasi_Keuangan, Perilaku_Keuangan				
b. Dependent Variable: Keputusan_Investasi				

Sumber: Output Olah Data Primer dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 11 di atas, terlihat bahwa kolom *Adjusted R Square* senilai sebesar 0,828 atau 82%. Ini menunjukkan bahwa keputusan investasi mahasiswa dipengaruhi sebesar 82% oleh faktor-faktor seperti uang saku, literasi keuangan, dan perilaku keuangan. Sementara itu, sisa 18% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

4. PEMBAHASAN

Pengaruh Uang Saku terhadap Keputusan Investasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Dalam konteks pengambilan keputusan berinvestasi, mahasiswa STIE Surakarta memerlukan uang saku sebagai faktor pendorong. Semakin besar uang saku yang dimiliki, semakin besar pula keputusan mereka untuk berinvestasi. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa jika mahasiswa tidak memiliki sumber uang saku atau tidak mampu mengalokasikan uang sakunya untuk investasi, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan investasi, mengingat investasi memerlukan dana

sebagai modal awal. Di sisi lain, jika mahasiswa memiliki uang saku yang mencukupi, kemungkinan besar mereka akan berinvestasi untuk meraih keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Dengan demikian, uang saku memiliki hubungan yang erat dengan pengambilan keputusan investasi. Temuan ini relevan dengan *Theory of Planned Behaviour*, di mana individu cenderung mengambil tindakan atau keputusan sesuai dengan keinginan mereka. Penelitian ini sejalan dengan temuan dari Nursyamsi *et al.* (2023), yang mengindikasikan bahwa uang saku berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi.

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima. Keputusan investasi yang diambil oleh mahasiswa di STIE Surakarta dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap literasi keuangan. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa, semakin baik pula keputusan investasi yang mereka buat. Temuan ini sejalan dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu *Theory of Planned Behaviour*, yang menyatakan bahwa seseorang cenderung akan mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Mandagie *et al.* (2020), yang mengungkapkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi.

Pengaruh Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H3 ditolak. Perilaku keuangan tidak

mempengaruhi atau tidak menjadi faktor pendorong mahasiswa di STIE Surakarta untuk membuat keputusan investasi. Perilaku keuangan yang cenderung konsumtif atau tidak terencana sering kali tidak memiliki dampak terhadap keputusan investasi mahasiswa., karena banyak dari mereka yang lebih memperhatikan faktor risiko dan potensi keuntungan daripada kondisi keuangan pribadi dalam pengambilan keputusan investasi. Hal itu berhubungan dengan *Theory Of Planned Behaviour* dimana manusia akan berpikir rasional dalam membuat pilihan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ratnasari & Yudiantoro (2023) yang menyatakan bahwa perilaku keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Siregar & Anggraeni (2022) yang menyatakan perilaku keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi.

Pengaruh Uang Saku, Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan terhadap Keputusan Investasi

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa H4 diterima. Uang saku, literasi keuangan dan perilaku keuangan sangat penting untuk keputusan berinvestasi mahasiswa di STIE Surakarta. Semakin banyak uang saku, pengetahuan tentang keuangan, dan perilaku keuangan yang mereka miliki, semakin baik keputusan berinvestasi mereka. Ini karena mahasiswa perlu tahu tentang keuangan agar mereka tidak membuat keputusan yang salah. Mahasiswa STIE Surakarta harus memiliki pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan yang tepat agar mereka tidak memiliki kebiasaan hidup yang konsumtif. Setelah memiliki pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan yang tepat, mereka

juga harus memiliki uang saku yang cukup bahkan lebih sebagai pendorong untuk investasi karena mereka harus menyesuaikan uang saku mereka sebelum memilih produk investasi yang akan mereka beli. Hal tersebut berhubungan dengan *Theory Planned Of Behaviour* dimana seseorang akan berpikir rasional dalam membuat pilihan, mereka juga akan memanfaatkan informasi dan pengalaman yang mereka miliki dalam melakukan tindakan atau keputusan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Susanti & Tipa (2024) yang menyatakan pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang didapat melalui kuesioner yang disebar kepada mahasiswa di STIE Surakarta, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Uang saku berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar uang saku yang dimiliki oleh mahasiswa maka semakin baik pula dalam pengambilan keputusan investasinya. Mahasiswa yang memiliki uang saku yang cukup bahkan lebih akan mengambil keputusan untuk investasi lebih banyak. Dan mahasiswa juga perlu menyesuaikan uang saku mereka pada saat memilih produk investasi. Jika mahasiswa tersebut uang sakunya tidak mencukupi atau kurang, mahasiswa akan kesulitan

- dalam melakukan investasi karena investasi membutuhkan dana untuk modal awal berinvestasi.
- 2) Literasi keuangan berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki mahasiswa maka semakin baik pula mahasiswa dalam mengambil keputusan investasi. Literasi keuangan dapat membantu seorang individu terhindar dari masalah keuangan yang mungkin akan dihadapi oleh investor pemula seperti mahasiswa. Pemahaman yang cukup mengenai aspek aspek literasi keuangan berguna untuk mahasiswa dalam menentukan keputusan berinvestasinya.
 - 3) Perilaku keuangan tidak berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perilaku keuangan tidak dibutuhkan mahasiswa STIE Surakarta dalam pengambilan keputusan investasinya. Hal ini menunjukkan faktor faktor lain seperti uang saku, literasi keuangan lebih berperan penting dalam membentuk keputusan investasi mahasiswa.
 - 4) Uang saku, literasi keuangan, perilaku keuangan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa di STIE Surakarta. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa secara bersama sama uang saku, literasi keuangan dan perilaku keuangan berperan penting dalam

pengambilan keputusan investasi mahasiswa. Uang saku sebagai dasar finansial yang memadai, literasi keuangan membantu mahasiswa memahami konsep dan risiko investasi, dan perilaku keuangan memungkinkan mahasiswa mengelola dana dengan bijak.

SARAN

Saran bagi pihak terkait :

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa STIE Surakarta mengenai perilaku keuangan yang sama pentingnya untuk pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik dan bijak.

Saran bagi peneliti selanjutnya :

- a) Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya wilayah Surakarta.
- b) Peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan sampel selain mahasiswa, sehingga tidak terpaku pada mahasiswa saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudiasuti, L. (2021). Analisis pengaruh keputusan investasi mahasiswa. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(3), 1138–1149.
- Dilasari. (2020). *PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL BEHAVIOUR, FINANCIAL*

ATTITUDE, LIFE STYLE, LOCUS OF CONTROL DAN DEMOGRAFI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF.

Diva, I., & Suardana, K. A. S. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Toleransi Risiko, Dan Faktor Demografi Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Ekonomi Dan Bisnis*, 12(05), 810–821.

Fridana, I. O., & Asandimitra, N. (2020). Analisis faktor yang memengaruhi keputusan investasi (studi pada mahasiswi di Surabaya). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 396–405.

Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat (Edisi ke-10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, W., Kristiastuti, F., & Sari, U. K. (2021). Pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio Bandung. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 19(2), 494–512.

Gustika, G. S., & Yaspita, H. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa STIE Indragiri Rengat. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 261–269.

Halik, J. B., Halik, M. Y., Latiep, I. F., & Balaba, E. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GAYA HIDUP, UANG SAKU MAHASISWA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN

INDONESIA PAULUS
MAKASSAR. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 5(1), 51–67.

<https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/66bb010b8a18b/jumlah-investor-pasar-modal-indonesia-terus-bertambah-hingga-akhir-2023>

https://rejogja.republika.co.id/berita/ru0lar399/jumlah-investor-pasar-modal-soloraya-melonjak-didominasi-kalangan-muda#google_vignette

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/12/01/mahasiswa-jadi-investor-galeri-investasi-bei-solo-tembus-rp-227-miliar-sebulan>

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/08/ojk-tengah-pelajari-kasus-mahasiswa-baru-uin-surakarta-diminta-daftar-pinjol-oleh-kakak-kelasnya>

Mandagie, Y. R. O., Febrianti, M., & Fujianti, L. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila). *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 35–47.

Mardiyana, L. O., & Ani, H. M. (2019). The effect of education and unemployment on poverty in East Java Province, 2011-2016. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 243(1), 012067.

Masdupi, E., Sabrina, S., & Megawati, M. (2019). Literasi keuangan dan faktor demografi terhadap perilaku keuangan mahasiswa Fakultas

- Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 8(1), 35–47.
- Melinda, M., Lesawengen, L., & Waani, F. J. (2022). Perilaku Konsumtif Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Mahasiswa Rantau (Studi Kasus Mahasiswa Toraja Di Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Nursyamsi, J., Sukirman, E., & Sukarno, A. (2023). ANALISIS FAKTOR–FAKTOR MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INVESTASI. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 80–88.
- Perwito, P., Nugraha, N., & Sugiyanto, S. (2020). Efek Mediasi Perilaku Keuangan terhadap Hubungan antara Literasi Keuangan dengan Keputusan Investasi. *Coopetition*, 11(2), 325690.
- Putri, W. D., Fontanella, A., & Handayani, D. (2023). Pengaruh Penggunaan Financial Technology, Gaya Hidup dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 51–72.
- Putri, W. W., & Hamidi, M. (2019). Pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan, dan faktor demografi terhadap pengambilan keputusan investasi (studi kasus pada mahasiswa magister manajemen fakultas ekonomi universitas andalas padang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 4(1), 210–224.
- Ratnasari, L., & Yudiantoro, D. (2023). Pengaruh literasi keuangan, perilaku keuangan dan pendapatan terhadap keputusan berinvestasi pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2).
- Sandi, K., Worokinasih, S., Darmawan, A., Kunci, K., Keuangan, P., & Keuangan, P. (2020). Pengaruh financial knowledge dan financial attitude terhadap financial behavior pada youth entrepreneur kota Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 1–10.
- Siregar, D. K., & Anggraeni, D. R. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 2(1), 96–112.
- Soleha, E., & Hartati, N. (2021). Analisis Perilaku Keuangan Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dalam Keputusan Investasi. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(01), 59–70.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta
- Surahman, D., Oktaviani, M., Setiawan, A. P., & Sa'diyah, H. (2023). Literasi Keuangan dan Uang Saku Sebagai Keputusan Berinvestasi: Perilaku Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 47–55.

Susanti, S., & Tipa, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Kota Batam. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2591–2606.

Yundari, T., & Artati, D. (2021). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan. *Perilaku Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi*.